

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**  
( Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung )

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya**

**ANDYS DWI SAPUTRA  
NIM. 105030400111019**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**MALANG**

**2014**

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**  
( Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung )

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya**

**ANDYS DWI SAPUTRA  
NIM. 105030400111019**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

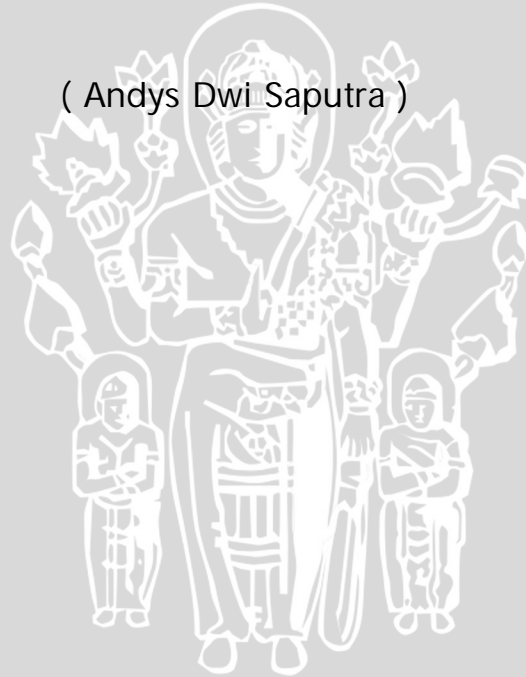
**MALANG**

**2014**

**HALAMAN MOTTO**

“Jangan pernah ragu dengan kemampuanmu sendiri. Jika  
kamu ragu dengan kemampuanmu, berhentilah mengeluh  
dan segera bertindak”

( Andys Dwi Saputra )



HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah ( Studi kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung )

Disusunoleh : Andys Dwi Saputra

NIM : 105030400111019

Fakultas : Ilmu Administrasi

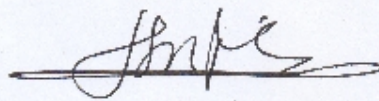
Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, Juli 2014

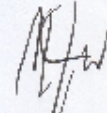
Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Nengah Sudjana, M.Si  
NIP. 19530909 19803 1 009

Anggota



Drs. Mehammad Djudi, M.Si  
NIP. 19520607 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

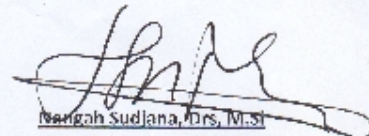
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

- Hari : Rabu
- Tanggal : 20 Agustus 2014
- Jam : 13.00 - 14.00
- Skripsi atas nama : Andys Dwi Saputra
- Judul : Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah ( Studi kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung )

Dan dinyatakan lulus


MAJELIS PENGUJI

Ketua



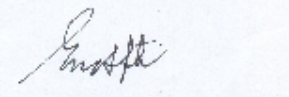
Nengah Sudjana, Drs, M.Si  
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota




Mochammad Diudi, Drs, M.Si  
NIP. 19530909 19803 1 009

Anggota



Endang Siti Astuti, Prof. Dr. M.Si  
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB  
NIP. 19530810 198103 2 012

## PALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, Juli 2014

Mahasiswa



ANDYS DWI SAPUTRA

NIM. 105030400111019

## RINGKASAN

Andys Dwi Saputra, 2014, **Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah** ( Studi kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung ), Drs. Nengah Sudjana, M.Si, Drs. Mochammad Djudi, M.Si, 82 Hal + xviii

Salah satu pendapatan yang paling besar dari PAD yaitu berasal dari pajak daerah, untuk meningkatkan PAD melalui pos pajak, pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melihat tingkat efektivitas pemungutan pajak tersebut. Setelah mengetahui tingkat efektivitas, untuk tetap meningkatkan minimal mempertahankan keadaan efektivitas perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Sehubungan dengan hal itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Laju Inflasi, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2008-2012.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*time series*) tahun 2008-2012 yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung dan ditunjang oleh studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Proses pengujian yang digunakan terdiri dari pengujian secara statistik meliputi uji t, uji F, dan uji determinasi (R<sup>2</sup>). Sedangkan untuk pengujian asumsi klasik meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh, efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut : Pajak Restoran sebesar 135 % yang berarti sangat efektif, BPHTB sebesar 126 % yang berarti sangat efektif, Pajak Air Tanah sebesar 119 % yang berarti sangat efektif, Pajak Hotel sebesar 119 % yang berarti sangat efektif, Pajak Hiburan sebesar 119 % yang berarti sangat efektif, Pajak Bahan Galian Golongan C sebesar 120 % yang berarti sangat efektif, Pajak Reklame sebesar 110 % yang berarti sangat efektif, Pajak Parkir sebesar 116 % yang berarti sangat efektif, dan Pajak Penerangan Jalan sebesar 106 % yang berarti sangat efektif, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008 – 2012 secara keseluruhan sangat efektif.

Diantara variabel Laju inflasi, jumlah penduduk dan PDRB maka yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah adalah variabel jumlah penduduk. Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menyarankan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menetapkan pajak daerah agar melakukan sosialisasi mengenai arti pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga wajib pajak sadar membayar pajak.

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Laju Inflasi, Jumlah penduduk, dan PDRB*

## SUMMARY

Andys Dwi Saputra, 2014, **The Analysis of Factors Influencing The Effectiveness of Local Tax Collection** (Case Study at The Local Income Official in Tulungagung District), Drs. Nengah Sudjana, M.Si, Drs. Mochammad Djudi, M.Si, 82 pages + xvi

Local tax is contributing the highest revenue to Local Genuine Income (PAD). The government attempts to increase the effectiveness of local tax collection to improve PAD, especially through tax post. There are factors influencing the effectiveness of local tax revenue. The objective of research is to understand the influence of inflation rate, population rate, and Gross Regional Domestic Product (PDRB) on local tax revenue in Tulungagung District in period 2008-2012.

Data type is secondary data (time series) for period 2008-2012 obtained from the Official of Local Revenue and the Statistic Bureau (BPS) in Tulungagung District. Literature study is conducted to support data collection. Analysis technique is multiple linear regression model. Some test methods are involved. Statistic test includes t-test, F-test, and determination test (R<sup>2</sup>), while classical assumption test involves normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and auto-correlation test.

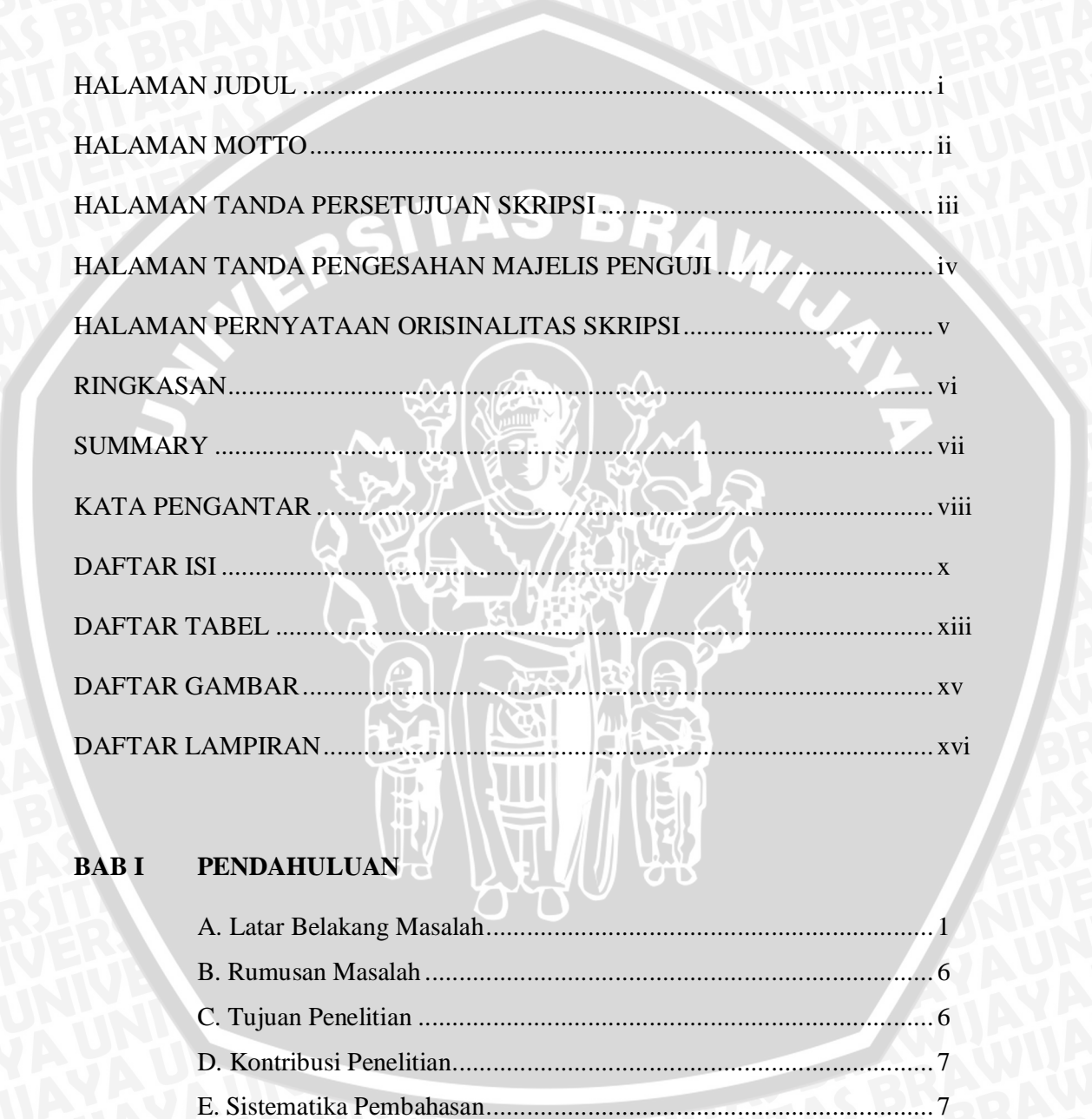
Result of research indicates that the effectiveness of local tax collection in Tulungagung District in period 2008-2012 is elucidated as follows: Restaurant Tax is 135 % which means very effective, BPHTB is 126 % which means very effective, Land Water Tax is 119 % which means very effective, Hotel Tax is 119 % which means very effective, Entertainment Tax is 119 % which means very effective, Type C Excavation Material Tax is 120 % which means very effective, Billboard Tax is 110 % which means very effective, Parking Tax is 116 % which means very effective, and Lamp Enlightenment Tax is 106 % which means very effective. It is then concluded that local tax collection in Tulungagung District in period 2008-2012 is entirely very effective.

Of all three variables observed, which are inflation rate, population rate and PDRB, one with the most dominant influence on local tax revenue is population rate. Based these results, it may be suggested that the local government of Tulungagung District, especially the Official of Local Revenue of Tulungagung District, in determining local tax shall firstly socialize the importance of tax for the development such that taxpayer will be aware of paying tax in exchange for their welfare.

Keywords: *Local Tax, Inflation Rate, Population Rate and PDRB*



**DAFTAR ISI**



HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9



B. Kajian Pustaka .....	11
1. Otonomi Daerah .....	11
2. Sumber – sumber Pendapatan Daerah .....	12
3. Pengelompokan Pajak dan Pajak Daerah.....	15
4. Efektivitas Pemungutan Pajak.....	22
5. Pengaruh Laju inflasi, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap efektivitas pemungutan Pajak Daerah .....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	30
D. Hipotesis Penelitian.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Variabel dan Pengukuran.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Analisis .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	43
1. Keadaan Geografis dan Topografi Kabupaten Tulungagung.....	43
2. Pemerintahan dan Perekonomian Kabupaten Tulungagung .....	44
3. Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung .....	45
B. Analisis Diskriptif .....	46
1. Penerimaan Pajak Daerah .....	47
2. Laju Inflasi .....	49
3. Jumlah Penduduk.....	51
4. PDRB .....	52

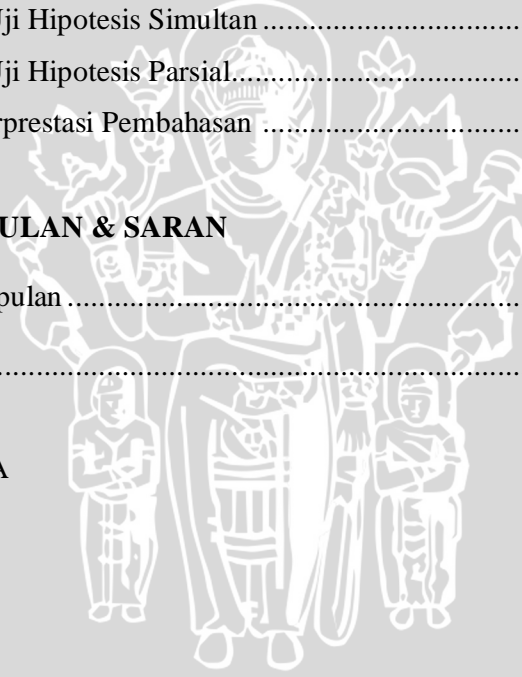


C. Pembahasan .....	54
1. Hasil Analisis Ratio .....	54
2. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	60
a. Hasil Uji Asumsi Normalitas Residual .....	60
b. Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas .....	62
c. Hasil Uji Asumsi Heterokedastisitas .....	63
d. Hasil Uji Autokorelasi .....	66
3. Hasil Uji Hipotesis .....	67
a. Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	67
b. Koefesien Determinasi .....	69
c. Uji Hipotesis Simultan .....	69
d. Uji Hipotesis Parsial .....	70
4. Interpretasi Pembahasan .....	72

**BAB V KESIMPULAN & SARAN**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tulungagung tahun 2012 .....	5
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3.1	Konsep, Variabel dan Indikator .....	36
Tabel 3.2	Skala pengukuran tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak .....	37
Tabel 4.1	Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2008 – 2012 .....	47
Tabel 4.2	Jumlah penerimaan jenis Pajak Daerah Tahun 2008 - 2010.....	48
Tabel 4.3	Jumlah penerimaan jenis Pajak Daerah Tahun 2011 - 2012.....	49
Tabel 4.4	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012.....	50
Tabel 4.5	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 .....	51
Tabel 4.6	Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2000 Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 .....	54
Tabel 4.7	Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 .....	54
Tabel 4.7.1	Tingkat Efektivitas Pajak Hotel .....	55
Tabel 4.7.2	Tingkat Efektivitas Pajak Restoran .....	56
Tabel 4.7.3	Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan .....	56
Tabel 4.7.4	Tingkat Efektivitas Pajak Reklame .....	57
Tabel 4.7.5	Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan .....	57
Tabel 4.7.6	Tingkat Efektivitas Pajak Galian Golongan C.....	58
Tabel 4.7.7	Tingkat Efektivitas Pajak Parkir .....	58
Tabel 4.7.8	Tingkat Efektivitas Pajak Air Tanah .....	59
Tabel 4.7.9	Tingkat Efektivitas BPHTB .....	59
Tabel 4.8	Nilai Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012.....	60
Tabel 4.9	Perhitungan pengujian Normalitas Kormogonov & Smirnov .....	61
Tabel 4.10	Hasil pengujian Normalitas Kormogonov & Smirnov .....	61
Tabel 4.11	Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	63
Tabel 4.12	Perhitungan pengujian Heterokedastisitas Uji Park .....	65

Tabel 4.13 Hasil pengujian Heterokedastisitas Uji Park..... 65

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Autokorelasi..... 66

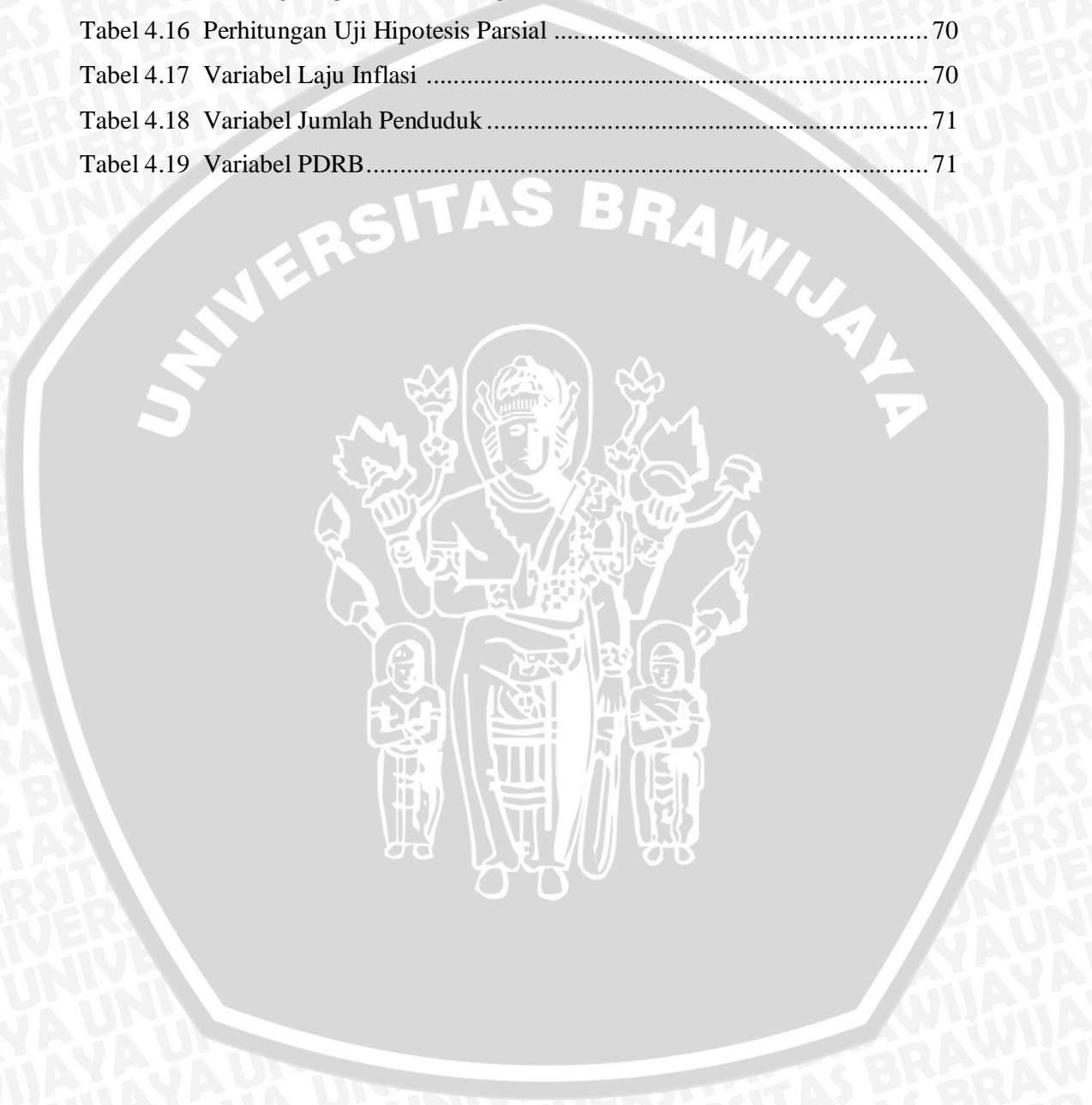
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda..... 67

Tabel 4.16 Perhitungan Uji Hipotesis Parsial ..... 70

Tabel 4.17 Variabel Laju Inflasi ..... 70

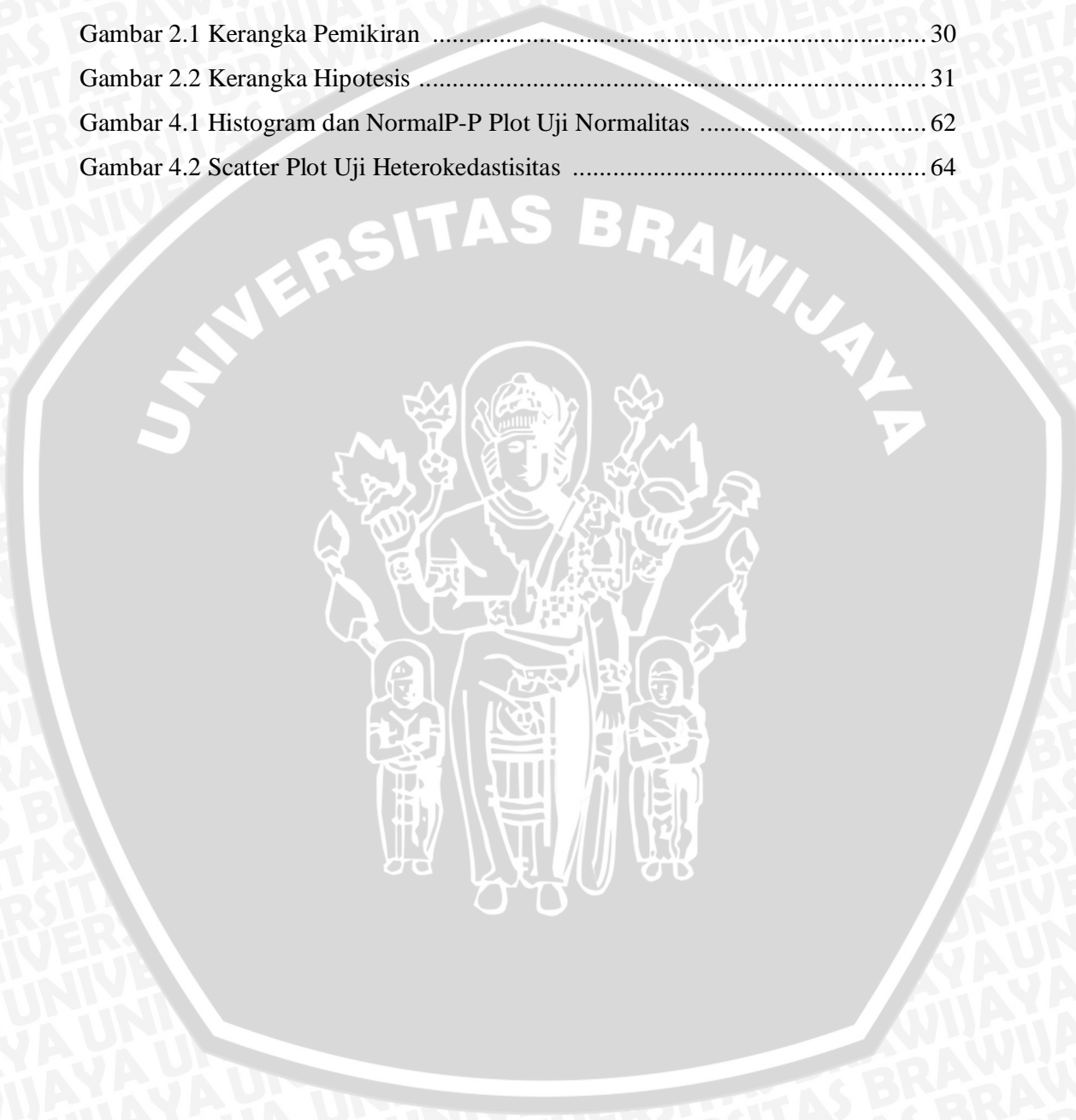
Tabel 4.18 Variabel Jumlah Penduduk ..... 71

Tabel 4.19 Variabel PDRB..... 71



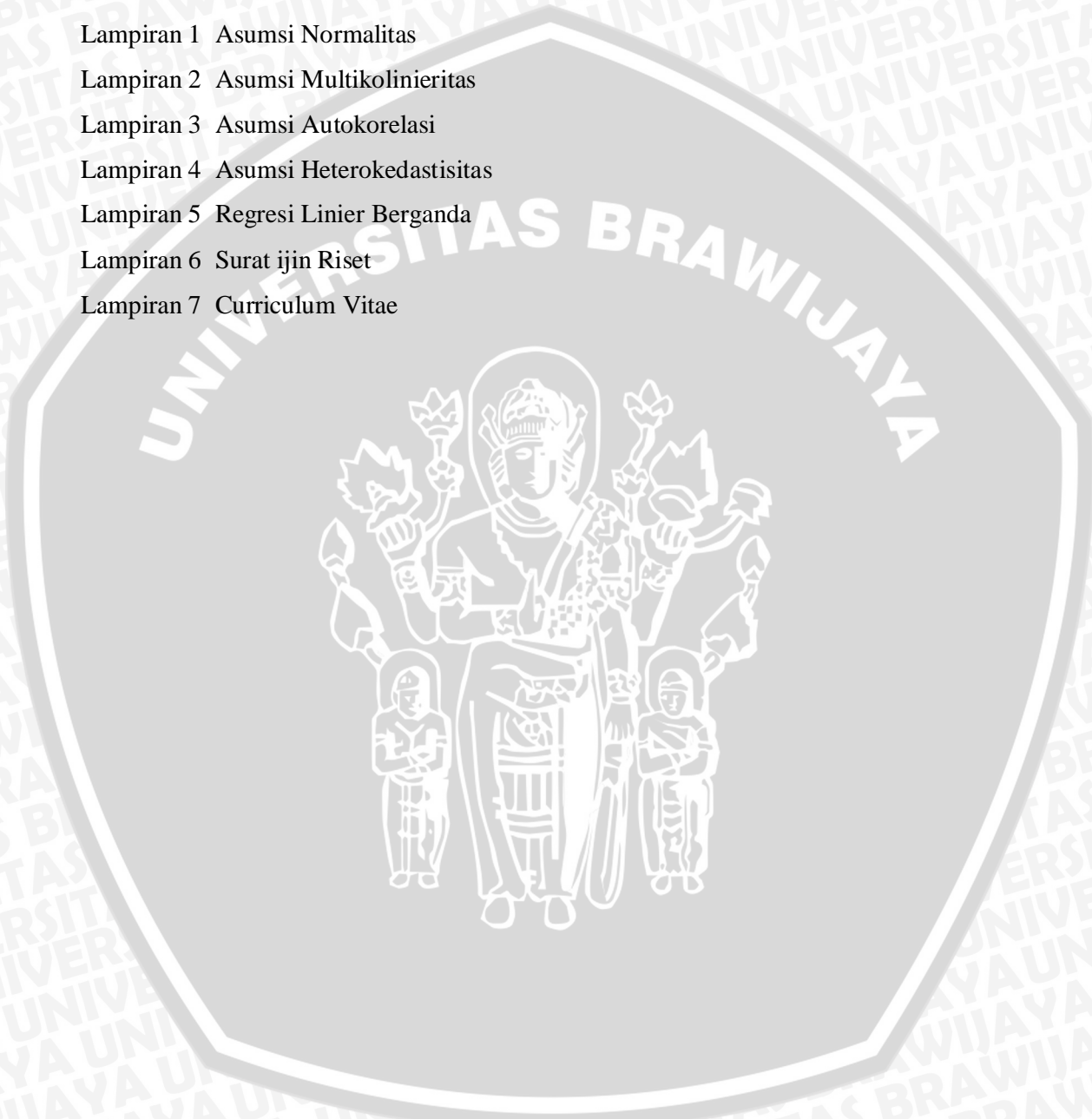
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	30
Gambar 2.2 Kerangka Hipotesis .....	31
Gambar 4.1 Histogram dan NormalP-P Plot Uji Normalitas .....	62
Gambar 4.2 Scatter Plot Uji Heterokedastisitas .....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Asumsi Normalitas
- Lampiran 2 Asumsi Multikolinieritas
- Lampiran 3 Asumsi Autokorelasi
- Lampiran 4 Asumsi Heterokedastisitas
- Lampiran 5 Regresi Linier Berganda
- Lampiran 6 Surat ijin Riset
- Lampiran 7 Curriculum Vitae



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah ( Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung )”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memnuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Kadarisman, selaku Kepala Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Yuniadi Mayowan, S.sos, MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya.
4. Ibu Imro'atul Mufidah, M.Si , selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.



5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Drs. Nengah Sudjana, M.Si, dan Bapak Mochammad Djudi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyelesaian penelitian ini.
7. Bapak, Ibu dan semua keluargaku yang selalu mendoakan untuk bisa menjadi orang yang sukses dan semangat dalam menulis skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu secara langsung terimakasih atas bantuannya kepada penulis hingga terselesaikannya penelitian ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2014

Penulis.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Menghadapi kondisi yang demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah

diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Penyelenggaraan otonomi daerah yang optimal, memerlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sebelumnya kurang mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintahan pusat sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Suatu daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran rakyat juga akan tercipta.

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Perusahaan milik Daerah yang sah dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan perwujudan otonomi daerah perlu dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan Pajak Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, sekiranya kasus yang

dapat diangkat memiliki sasaran yang tepat bahwa di dalam pendekatan maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat diharapkan pemerintah daerah menggunakan upaya yang cenderung merupakan pembenahan *internal*, yaitu dengan variabel dependen penerimaan Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dan variabel laju inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB ( Pendapatan Domestik Regional Bruto ) sebagai variabel independen. Variabel laju inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB digunakan sebagai variabel independen karena variabel – variabel tersebut dianggap mempunyai pengaruh yang sangat signifikan sebagai sumber potensi pengaruh peningkatan penerimaan pajak daerah.

Laju inflasi mempunyai dampak yang luas terhadap penerimaan pajak daerah, laju inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan. Peningkatan biaya produksi akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan berkurang. Oleh karena berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut menjadi semakin menurun. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa laju inflasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, dimana bila laju inflasi meningkat, maka penerimaan pajak daerah akan menurun.

Perkembangan jumlah penduduk juga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Perkembangan jumlah penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi karena penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi. Pertama dari segi

permintaan dan kedua dari segi penawaran, dari segi permintaan yaitu penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidak selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula sehingga pertumbuhan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah.

Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB, selain laju inflasi dan jumlah penduduk, PDRB juga mempunyai dampak yang luas terhadap penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pay*) berbagai pungutan, seperti pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas sangat menarik untuk dikaji seberapa efektif pos pajak daerah tersebut, dan bagaimana pengaruh laju inflasi, jumlah penduduk dan PDRB dalam mempengaruhi efektivitas pemungutan pos pajak daerah

tersebut. Sebagai studi kasus dalam penelitian ini akan diangkat mengenai efektivitas pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung dan faktor – faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tulungagung Tahun 2012

	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Pajak Daerah</b>	Rp 22.310.000.000	Rp 25.544.000.000
<b>Retribusi Daerah</b>	Rp 14.335.000.000	Rp.15.585.000.000
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	Rp.1.855.000.000	Rp.1.855.000.000
<b>PAD Lain - lain</b>	Rp. 92.267.000.000	Rp. 119.177.000.000
<b>Jumlah PAD</b>	Rp. 130.768.000.000	Rp. 162.162.000.000

Sumber : <http://www.dispenda.pemkabta.com>.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung meskipun masih dibawah sektor PAD lain - lain. Pungutan Pajak Daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah ( Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 ) terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak mineral logam bukan batuan, Pajak penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, PBB P2, dan BPHTB . Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat mengubah dan mendefinisikan jenis pajak sesuai dengan kebutuhan daerah dan sumber daya yang sah disetiap daerah masing-masing. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil judul : “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah*” (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang dikemukakan maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang menjadi inti dari pembahasan dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah ada pengaruh Laju inflasi terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung ?
2. Apakah ada pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung ?
3. Apakah ada pengaruh PDRB terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Laju inflasi terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

##### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan kenyataan-kenyataan di masyarakat, serta dapat dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa.

##### **2. Kontribusi Praktis**

- a. Bagi Penulis : Untuk mengetahui tentang faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung : Setidaknya dapat dijadikan referensi informasi untuk dapat lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan terbaik yang telah dikeluarkan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Daerah yang efektif demi tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tulungagung.
- c. Bagi Peneliti lain : Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pendahuluan merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kontribusi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.



**Bab II : Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka memuat uraian secara konseptual mengenai tinjauan umum tentang Otonomi Daerah, tinjauan tentang Pendapatan Daerah, tinjauan tentang Pajak Daerah, pemungutan Pajak Daerah, dan tinjauan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Daerah.

**Bab III : Metode Penelitian**

Metode penelitian membahas tentang jenis pendekatan, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.

**Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang meliputi gambaran umum Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah baik Pajak Daerah secara keseluruhan maupun masing-masing jenis pajak yang ada di Kabupaten Tulungagung, dan faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung.

**Bab V : Penutup**

Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan, yang berisikan kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan. Kemudian juga menyertakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi penelitian serta keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penulisan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian dari Helti (2010) dengan judul Analisis Faktor - faktor yang mempengaruhi Pajak Daerah serta tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar).

Pada penelitian ini diketahui diantara variabel inflasi, jumlah penduduk dan PDRB maka yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah adalah variabel jumlah penduduk. Variabel yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah ini, digunakan untuk mengambil kebijakan efisiensi dan efektivitas Pajak Daerah.

Hasil penelitian dari Nurrohman (2010) dengan judul Analisis faktor -faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah di kota Surakarta (Tahun 1994-2007).

Pada penelitian ini diketahui dalam Uji parsial (uji t) menunjukkan variabel independen yaitu PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah kota Surakarta tahun 1994- 2007. Dari hasil pengujian diperoleh nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,8976. Berarti bahwa 89,76% variasi variabel dependen Pajak Daerah dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk. Sedangkan sisanya yaitu 10,24% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model. Dan pada hasil pengujian asumsi klasik menyimpulkan bahwa variabel independen (PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk) tidak terdapat masalah multikolinearitas dan masalah heteroskedastisitas, sedangkan pada uji autokorelasi disimpulkan bahwa pengujian tidak meyakinkan karena berada pada daerah ragu-ragu.

Hasil penelitian dari Fajarwati (2008) dengan judul Analisis efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Daerah (Studi kasus pemerintahan Kota Surakarta).

Penelitian ini menggunakan metode analisis ratio dan analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini diketahui bahwa kondisi pemungutannya sudah efisien. Pemerintah kota Surakarta mempunyai produktivitas yang baik dalam mengelola Pajak Daerah karena dapat mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang serendah - rendahnya. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah

Surakarta menunjukkan kondisi pada tingkat yang efektif . Diantara variabel inflasi, laju pertumbuhan penduduk dan PDRB maka yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah adalah variabel PDRB dan pertumbuhan penduduk. Variabel yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah ini, digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat supaya pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak Daerah.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian terdahulu

Aspek Pembeda	Penelitian Terdahulu		
		Kristiana Advina Helti (2010)	Alfian Nurrohman (2010)
Lokasi Penelitian	Kabupaten Karanganyar	Kota Surakarta	Kota Surakarta
Variabel	Independen : 1. Inflasi ( $X_1$ ) 2. Jumlah Penduduk ( $X_2$ ) 3. PDRB ( $X_3$ ) Dependen : 1. Penerimaan Pajak Daerah (Y)	Independen : 1. Inflasi ( $X_1$ ) 2. Jumlah Penduduk ( $X_2$ ) 3. PDRB ( $X_3$ ) Dependen : 1. Penerimaan Pajak Daerah (Y)	Independen : 1. Inflasi ( $X_1$ ) 2. Jumlah Penduduk ( $X_2$ ) 3. PDRB ( $X_3$ ) Dependen : 1. Penerimaan Pajak Daerah (Y)
Hasil	Variabel jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah.	Menunjukkan variabel independen yaitu PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah kota Surakarta tahun 1994- 2007.	Diantara variabel inflasi, laju pertumbuhan penduduk dan PDRB maka yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah adalah variabel jumlah penduduk dan PDRB.

Berdasarkan pendapat dari beberapa peneliti terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Daerah, maka penelitian ini akan memfokuskan kajian pustaka yang dikemukakan para peneliti terdahulu yang mengemukakan bahwa efektivitas pemungutan Pajak

Daerah ditentukan oleh tiga faktor yaitu, laju inflasi, Jumlah penduduk dan PDRB.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian dari daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih nyata dan luas serta bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Kesimpulan Dari beberapa pengertian otonomi daerah yang diberikan diatas, dapat dilihat bahwa secara umum definisi mengenai otonomi daerah memiliki kesamaan satu sama lain.

Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan untuk memajukan perekonomian daerah. Selain tujuan di atas, pada dasarnya terkandung empat misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Mardiasmo (2003:59).

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan
- b. Kesejahteraan masyarakat.
- c. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- d. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*publik*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran DPRD. Otonomi daerah di daerah kabupaten atau kota, daerah dapat membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya yang artinya daerah sudah diberi kewenangan yang utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

## 2. Sumber- Sumber Pendapatan Daerah

Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sumber-sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari :

#### 1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana pajak daerah, penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah juga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga) merupakan penerimaan yang berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan prinsip pengelolaan. Berdasarkan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan asas *public service* dan sebagian keuntungan wajib disetorkan ke daerah.

### 4) Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber-Sumber Lain PAD yang Sah antara lain penerimaan-penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti : jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

#### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan-penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari :

#### 1) Dana Bagi Hasil Daerah

Dana Bagi Hasil Daerah yang bersumber dari pajak antara lain : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Dana Bagi Hasil Daerah yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

#### 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

### 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

### 4) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis PAD dan Dana Perimbangan.

## 3. Pengelompokan Pajak & Pajak Daerah

Pengertian Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Mardiasmo (2011:2), beberapa Syarat Pemungutan Pajak agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) yaitu di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian yaitu, pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) yaitu sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana yaitu sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Sistem Pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2011:7-8) :

- 1) *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- 2) *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.



Mardiasmo (2011), pengelompokan Pajak didasarkan atas golongan, sifat, dan dana lembaga pemungutannya dan dimasukkan dalam satu kelompok, sehingga terjadi pembagian pajak sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(PDRD) dimana sebelumnya telah diubah beberapa kali dengan UU No.34 Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 1997, telah berlaku sejak disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009. Melalui UU PDRD, diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, Pajak Daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam UU PDRD 2009, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran tarif Pajak Daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengadakan pemungutan PDRD dalam pelaksanaan otonomi selain mempertimbangkan kriteria-kriteria yang berlaku secara umum, juga harus mempertimbangkan ketepatan PDRD. Adapun fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi budgeter yaitu bahwa pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Fungsi regulator yaitu bahwa pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, penguatan *local taxing power* diberikan pada daerah propinsi yang memiliki diskresi atau kewenangan untuk menetapkan tarif Pajak Daerah dengan batasan tarif minimum dan maksimum. Pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut akan mempermudah daerah mengaitkan pengenaan tarif dengan tingkat pelayanan (*the benefit tax-link*). Daerah dapat mendesain kebijakan tarif pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengenakan tarif pajak yang tinggi untuk meningkatkan

kualitas pelayanan, atau menurunkan tarif pajak untuk menarik investasi ke daerahnya.

Dalam UU No.28 Tahun 2009, Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB & KAA);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB & KAA);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & AP);
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten atau Kota yaitu :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah

Jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan penambahan 3 (tiga) jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru, yaitu PBB Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang

Burung Walet. Penerimaan pajak yang selama ini dipungut oleh Pusat, yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB memang telah diserahkan kepada daerah sehingga tidak akan banyak berdampak terhadap tambahan beban masyarakat. Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak baru yang dapat dipungut oleh beberapa daerah apabila memiliki potensi pajak yang memadai.

Pemberlakuan pemungutan pajak baru tersebut dilakukan secara bertahap. BPHTB telah dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah mulai 1 Januari 2011, sedangkan Pajak Rokok dan PBB Perdesaan dan Perkotaan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah pada tanggal 1 Januari 2014. Selama masa peralihan tersebut, Pemerintah memberikan berbagai fasilitas yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif Pajak Daerah adalah Penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, antara lain :

- a. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- c. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
- d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
- e. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

- f. Tarif Pajak Mineral bukan logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25 %
- g. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30 %
- h. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 %
- i. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 %

Dasar Pengenaan Pajak, undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kota atau kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
- c. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- h. Pajak Air Tanah dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar atas pemanfaatan air tanah.

- i. BPHTB dikenakan atas jumlah bea perolehan yang dikeluarkan untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

Cara Perhitungan Pajak adalah besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat, menurut Marihot (2005:65) : Pajak Terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak.

#### 4. Efektivitas Pemungutan Pajak

Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara *output* yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar *output* yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektif. Tingkat efektivitas pemungutan pajak adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan besarnya target yang telah ditentukan. Menurut Mahmudi (2007) tingkat efektivitas Pemungutan pajak diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

#### 5. Pengaruh Laju Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB terhadap efektivitas pemungutan Pajak Daerah

##### a. Laju Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau meningkatkan kenaikan) sebagian besar dari barang-barang lain.

Pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada setiap daerah tidak lepas dari adanya masalah inflasi, pemasukan dan pengeluaran pemerintah juga dapat menimbulkan inflasi, dimana pemasukan uang pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Oleh karena itu, penerimaan pemerintah dapat diterima melalui pungutan pajak dan memperluas sumber-sumber penerimaan lainnya.

Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan terjadinya inflasi, antara lain Indeks Biaya Hidup (*cost of living*), Indeks Harga Konsumen (*consumer price index*), Indeks Implisit Produk Domestik Brutto (*GDP Deflator*) atau Indeks Harga Perdagangan Besar (*whole sale prices index*). Masing-masing pengukuran tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan. Jika pengukuran dimaksudkan untuk menetapkan upah buruh riil maka lebih tepat digunakan Indeks Biaya Hidup (IBH) atau Indeks Harga Konsumen.

Sementara itu *GDP deflator* yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan indeks yang lain lebih mencerminkan perkembangan tingkat harga umum. Beberapa indeks harga yang sering digunakan dalam pengukuran inflasi adalah :

1) Indeks harga konsumen/IHK (*consumer price index*)

Indeks ini mengukur biaya/pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli rumah tangga untuk keperluan hidup. Banyaknya barang dan jasa yang dihitung bermacam-macam. Laju inflasi dihitung dengan cara menghitung persentase kenaikan atau penurunan indeks harga ini dari tahun ke tahun.

*Contoh* : IHK tahun 2011 = 234,46 (tahun dasar 2002=100) dan IHK tahun 2012 = 262,31, maka laju inflasi antara tahun 2011 dan 2012 adalah :

$$\text{Inflasi} = \frac{262,31 - 234,46}{234,46} \times 100 = 11,8\%$$

2) Indeks harga perdagangan (*whole sale price index*)

Indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Termasuk didalamnya harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi. Indeks ini sejalan atau searah dengan indeks harga konsumen.

### 3) GNP deflator

GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP dan jumlahnya lebih banyak dibanding dua indeks lainnya. GNP deflator diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas harga dasar yang berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan) atau :

$$\text{GNP deflator} = \frac{\text{GNP nominal}}{\text{GNP riil}} \times 100$$

Inflasi mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian suatu negara. Inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan. Peningkatan biaya produksi akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan berkurang. Oleh karena berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka pajak yang dipungut lebih rendah. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa laju inflasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah, dimana bila laju inflasi meningkat, maka penerimaan Pajak Daerah akan menurun.

### b. Jumlah Penduduk

Cara mendapatkan gambaran mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah atau negara, diperlukan data yang akurat mengenai aspek-aspek kuantitas dan kualitas penduduk. Tingkat akurasi data yang diperoleh sangat memengaruhi ketelitian hasil analisis dan prediksi kondisi kependudukan. Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki beberapa sumber data kependudukan, yaitu hasil sensus, survei, dan registrasi penduduk.

#### 1) Sensus



Sensus atau cacah jiwa adalah proses pencatatan, perhitungan, dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal menetap di suatu wilayah atau negara tertentu secara bersamaan. Sensus dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.. Tujuan utama dilaksanakan sensus penduduk antara lain untuk mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk dalam periode waktu tertentu, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk di berbagai wilayah, serta mengetahui kondisi demografis lainnya, seperti tingkat kelahiran, kematian, komposisi, dan migrasi. Sensus dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Sensus *de jure* adalah proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat bertempat tinggal di suatu wilayah, umumnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sensus *de facto*, yaitu proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus.

## 2) Survei

Survei hampir sama dengan sensus. Perbedaan dari kedua proses pencacahan tersebut terletak pada waktu pelaksanaan, wilayah, dan jumlah penduduk yang di data. Proses pendataan survei hanya dilakukan terhadap sampel (contoh) penduduk di beberapa wilayah yang dianggap dapat mewakili karakteristik semua penduduk di sekitar wilayah sampel. Survei adalah proses pencacahan terhadap sampel

penduduk di beberapa wilayah yang dapat mewakili karakter wilayah secara keseluruhan.

### 3) *Registrasi Penduduk*

Sumber data kependudukan yang ketiga adalah registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa kependudukan harian dan kejadian-kejadian yang mengubah status seseorang, seperti peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan tempat tinggal, dan kematian.

Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi, karena penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas perkembangan jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar Pajak Daerah. Semakin besar laju pertumbuhan jumlah penduduk, akan ada kemungkinan untuk menambah jumlah penerimaan Pajak Daerah. Penduduk yang sudah sejahtera dan berkecukupan, akan ada kemungkinan untuk menambah jumlah penerimaan Pajak Daerah. Penduduk yang sudah sejahtera, akan melakukan aktivitas kebutuhan tersier, misalnya : makan ke restoran, tidur menginap di hotel, rekreasi datang ke acara hiburan,

membeli peralatan elektronik, membangun rumah dan menggunakan fasilitas area parkir yang ada di daerahnya masing-masing.

c. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang atau jasa yang diperoleh di dalam suatu wilayah atau daerah dalam satu tahun tertentu. Semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Perkembangan PDRB atas dasar berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya, untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan.

Produk riil per kapita biasanya juga dipakai sebagai indikator untuk menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran ekonomi dari tahun ke tahun. Pada perencanaan, proyeksi dan penentuan target, selalu bertitik tolak dari perhitungan atas dasar harga konstan. Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat mencerminkan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar, dari segi metode Statistik, suatu nilai atas dasar konstan diperoleh dengan cara :

1) Revaluasi

Revaluasi dilakukan dengan cara mengalikan kuantum pada tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang terlalu banyak disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya

diperoleh dari perkalian output pada masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

#### 2) Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi. Ekstrapolasi dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan.

#### 3) Deflasi

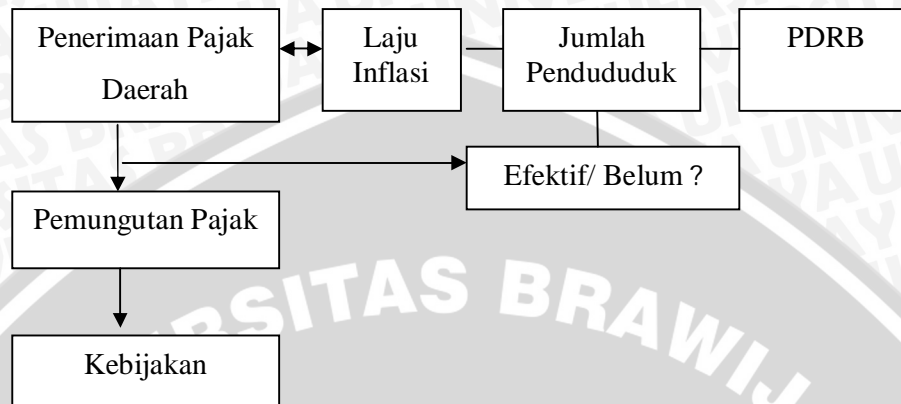
Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen dan sebagainya.

#### 4) Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga konsumen dan indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya.

PDRB sangat berpengaruh pada penerimaan pajak daerah karena apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula, dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan meningkat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

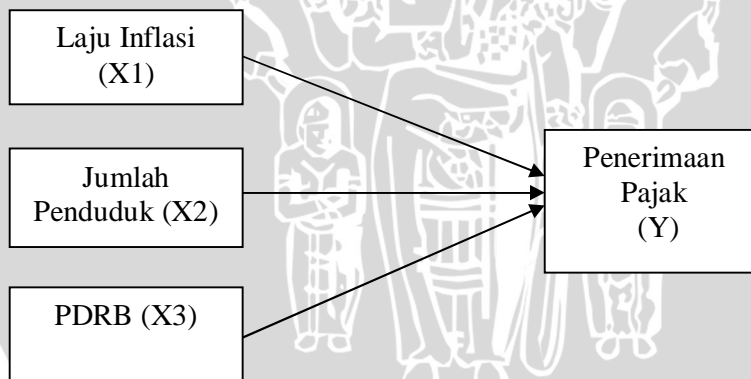
Keterangan :

Pos Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang paling besar nilainya. Maka dalam penelitian ini, akan dihitung tingkat efektivitas pungutan Pajak Daerah. Selama lima tahun (peneliti menggunakan tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2012 sebagai sampel penelitian), dihitung pada tingkat efektivitasnya, apakah selama lima tahun terakhir pungutan Pajak Daerah pada tingkat sudah efektif (sesuai target) atau belum efektif (tidak sesuai target). Setelah mengetahui tingkat efektivitas pungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung, maka kesimpulan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah meningkatkan atau mempertahankan tingkat efektivitas dengan cara meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah tersebut, perlu dicari sebab-akibat yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah. Pada penelitian ini yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah adalah laju inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB. Dengan mengetahui sebab-akibat yang

mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah, dapat membantu Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menentukan kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah sehingga dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

#### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dan penjelasan diatas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemungutan Pajak Daerah adalah laju Inflasi, Jumlah penduduk dan PDRB. Hipotesis yang digunakan peneliti adalah hipotesis Korelasional, yaitu hipotesis yang berisi pernyataan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel.



Gambar 2.2. Kerangka Hipotesis

Berdasarkan kerangka hipotesis diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga variabel Laju Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung.

2. Diduga variabel Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung.
3. Diduga variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan variabel laju inflasi, jumlah penduduk dan PDRB sebagai variabel independen dan penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen. Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode *explanatory research*, karena sesuai dengan tujuannya yaitu mendapatkan informasi secara lengkap dan akurat mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Daerah.

Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka – angka atau pernyataan – pernyataan yang dinilai, dan dianalisis dengan analisis statistik. Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif karena peneliti bermaksud ingin menguji hipotesis penelitian. Sedangkan pengertian dari metode *explanatory research* adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Pernyataan diatas memperjelas bahwa penelitian kuantitatif dengan metode *explanatory research* adalah penelitian yang cocok untuk judul penelitian analisis faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Daerah (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung).



## B. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tulungagung, tepatnya di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung.

Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena peneliti tertarik dengan tingkat penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung yang presentase kenaikannya sangat tinggi, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, peneliti juga ingin mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Tulungagung.

## C. Variabel dan Pengukuran

### 1. Definisi Variabel

#### a. Variabel Independen

- 1) Laju Inflasi ( $X_1$ ), pengukuran laju inflasi yaitu menggunakan Indeks Harga Konsumen/IHK dengan tahun dasar 2002, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laju inflasi per triwulan dari tahun 2008-2012. Data laju inflasi dihitung dengan cara menghitung persentase kenaikan atau penurunan indeks harga dari tahun ke tahun dan dinyatakan dalam persen (%).

2) Jumlah penduduk ( $X_2$ ), pengukurannya adalah banyaknya penduduk yang terdapat di Kabupaten Tulungagung yang diukur dalam satuan jiwa per tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk per triwulan dari tahun 2008-2012.

3) PDRB ( $X_3$ ), pengukurannya yaitu dengan cara mendeflaktorkan/mengindekskan PDRB harga konstan 2008-2012 menjadi harga konstan 2000, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB per triwulan dari tahun 2008-2012.

b. Variabel Dependen (Y)

1) Penerimaan Pajak (Y), pengukurannya adalah mencari angka yang didapat setelah melakukan pemungutan Pajak Daerah terhadap wajib pajak yang ada di Kabupaten Tulungagung selama tahun anggaran tertentu yaitu dari tahun 2008-2012 dalam nilai rupiah.

2. Definisi Operasional Variabel :

a. Target penerimaan Pajak Daerah adalah angka yang ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sebagai angka yang harus dicapai oleh penerimaan pajak daerah pada suatu tahun tertentu dalam satuan nilai rupiah. Realisasi penerimaan Pajak Daerah adalah angka yang didapat setelah dilakukan pemungutan Pajak Daerah terhadap wajib pajak yang ada di Kabupaten Tulungagung selama tahun anggaran tertentu dalam nilai rupiah.

- b. Laju Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang ada di Kabupaten Tulungagung, secara umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama (terus-menerus) dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen dan dinyatakan dalam persen (%).
- c. Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang terdapat di Kabupaten Tulungagung yang diukur dalam satuan jiwa per tahun.
- d. PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) adalah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi di Kabupaten Tulungagung dalam 1 (satu) tahun tertentu dengan berlaku konstan diukur dalam rupiah per tahun.

Tabel 3.1 Konsep, Variabel, Indikator

Konsep	Variabel	Indikator
Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Daerah	Laju Inflasi ( $X_1$ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Biaya Hidup (<i>cost of living</i>)</li> <li>• Indeks Harga Konsumen (<i>consumer price index</i>)</li> <li>• Indeks Implisit Produk Domestik Brutto (<i>GDP Deflator</i>) atau Indeks Harga Perdagangan Besar</li> </ul>
	Jumlah Penduduk ( $X_2$ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensus</li> <li>• Survei</li> <li>• Registrasi Penduduk</li> </ul>
	PDRB ( $X_3$ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk riil per kapita</li> </ul>
Efektivitas pemungutan Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah ( $Y$ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi penerimaan Pajak Daerah</li> </ul>



#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara Dokumentasi dan melakukan pencatatan data secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dan data runtun waktu (*time series*) dengan periode pengamatan antara tahun 2008 sampai tahun 2012. Data yang diperoleh dihimpun melalui teknik kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mengumpulkan teori dari buku-buku literature, laporan tahunan, serta hasil penelitian terdahulu.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber di luar data primer yang sudah diolah seperti : Dokumen jenis – jenis pajak daerah, data target dan realisasi pemungutan pajak daerah, tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah, data statistik dan keterangan lain yang berhubungan dengan penelitian. Semua data-data ini diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Badan Pusat Statistik, dan Perpustakaan.

#### E. Teknik Analisis

##### 1. Analisis Ratio

Metode analisis yang dilakukan adalah Tingkat efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan besarnya target yang telah ditentukan. Menurut Mahmudi (2007), tingkat efektivitas diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Skala pengukuran tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak

Nilai	Keterangan
95 % - 100 %	Sangat Efektif (SE)
80 % - < 94 %	Efektif (E)
68 % - < 79 %	Cukup Efektif (CE)
56 % - < 67 %	Kurang Efektif (KE)
0 % - < 55 %	Tidak Efektif (TE)

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Normalitas bertujuan untuk apakah variabel sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Menurut Santoso (2002:211) mengatakan “Dasar pengambilan keputusan : jika data menyebar disekitar diagonal, maka model regresi mengikuti asumsi normalitas, sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas”. Metode yang digunakan dalam menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov.

### b. Uji asumsi Multikolenieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian dari asumsi yang terkait bahwa variabel bebas pada suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Kolinieritas ganda terjadi apabila terdapat hubungan yang sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel secara individu terhadap variabel terikat. Pengertian dari asumsi ini adalah bahwa setiap variabel bebas (prediktor) hanya berpengaruh pada variabel respon, dan bukan pada variabel bebas

lainnya. Pengujian multikolinieritas menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF).

c. Uji Asumsi Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Metode yang dapat dipakai untuk mendeteksi gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah metode grafik. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

d. Uji Asumsi Autokorelasi

Seperti Uji Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas, maka Uji Autokorelasi juga merupakan salah satu asumsi dari model regresi linier klasik. Menurut Gujarati (1995), “Autokorelasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau time series atau ruang”. Gujarati (1995) mengatakan “pada hakikatnya istilah autokorelasi adalah berbeda dengan autokorelasi dan serial korelasi adalah sinonim”.

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi yaitu : Uji (*Durbin-Watson d test*), Uji *Lagrange*

*Multiplier Test ( LM Test), Uji Breusch-Godfrey (Breusch-Godfrey Test), Uji ARCH (ARCH Test).* Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi akan digunakan Uji *Lagrange Multiplier Test ( LM Test)*. Langkah dari pengujian ini adalah dengan melakukan regresi terhadap variabel independen dengan residual dari regresi OLS sebagai variabel dependennya. Setelah dilakukan regresi maka nilai  $R^2$  dari hasil regresi tersebut dibandingkan dengan nilai  $X^2$  dalam tabel. Apabila  $(n-1) R^2 > X^2$  maka terjadilah masalah autokorelasi dan sebaliknya.

### 3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Regresi Linear Berganda yaitu untuk menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dan untuk menguji mengenai seberapa besar pengaruh laju Inflasi, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak Daerah, maka digunakan rumus regresi linear berganda sebagai berikut : Menurut Gujarati (1995:196),  $Y = \beta_0 + \beta_1 \text{ INF} + \beta_2 \text{ JMLPDK} + \beta_3 \text{ PDRB} + \mu_i$  .....

Dimana :

- Y : Pajak Daerah
- INF : Variabel Inflasi
- JMLPDK : Variabel Jumlah Penduduk
- PDRB : Variabel PDRB
- $\beta_0$  : Koefisien Intersep
- $\beta_1$  : Koefisien Inflasi
- $\beta_2$  : Koefisien Jumlah Penduduk
- $\beta_3$  : Koefisien PDRB
- $\mu_i$  : Varian pengganggu

#### a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Menurut Ghozali (2006), kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap penambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan nilai *R Square* untuk mengevaluasi model regresi terbaik.

#### b. Uji Hipotesis Simultan

Untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik F Pengujian secara serentak ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, dengan menentukan hipotesis. Menurut Gujarati (1995:134) sebagai berikut : “ $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$  dan  $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4$ ” Kriteria pengujiannya adalah :  $H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = 0$  tidak ada pengaruh yang signifikan antara inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak Daerah.  $H_a: \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq 0$  ada pengaruh yang signifikan antara inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak Daerah.

#### c. Uji Hipotesis Parsial



Untuk menguji hipotesis II yaitu pengaruh parsial dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik t. Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain tetapi dengan menggunakan derajat keyakinan 5 %. Hipotesis yang akan diuji menurut Gujarati (1995:119) adalah :

$H_0 : \beta_1 = 0$  variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq 0$  variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujiannya adalah : Apabila nilai t signifikan, atau jika nilai probabilitasnya < tingkat  $\alpha$  (derajat signifikan) maka koefisien regresi signifikan pada tingkat tertentu maka  $H_a$  ditolak,  $H_0$  diterima, artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

##### 1. Keadaan Geografis dan Topografi Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi  $111^{\circ} 43'$  sampai dengan  $112^{\circ} 07'$  bujur timur dan  $7^{\circ} 51'$  sampai dengan  $8^{\circ} 18'$  lintang selatan. Batas daerah disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai  $1.055.65 \text{ Km}^2$  terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan.

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan laut yaitu Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 desa. Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kalidawir, Sendang dan Kecamatan Pagerwojo.

## 2. Pemerintahan dan Perekonomian Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya. Dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka peran Pemerintah daerah menjadi lebih besar kewenangan dari Pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah sehingga tingkat keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung situasi dan kondisi Pemerintah daerah yang bersangkutan.

Unit pemerintahan daerah dibawah kabupaten Tulungagung secara langsung adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi kedalam desa/kelurahan. Kabupaten tulungagung terbagi atas 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1.851 Rukun warga (RW) dan 6.404 Rukun tetangga (RT). Kecamatan yang mempunyai desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.

Krisis Ekonomi global yang melemahkan dunia pada tahun 2008 ternyata membawa dampak pada perekonomian nasional, yang berimbas pula pada kondisi perekonomian regional, yang berimbas pula pada kondisi perekonomian regional. Perekonomian nasional pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 6,0% lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2007 yang tumbuh 6,2%, sedangkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008 ke atas terus meningkat. Berdasarkan data statistik,tahun 2008 sebesar 5,68 %, tahun 2009 sebesar 6,01 %, tahun 2010 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,48% naik

menjadi 6,73 ditahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 6,98% .

Dilihat dari PDRB per kapita tahun 2011 sebesar Rp. 19,11 juta dan mengalami kenaikan di tahun 2012 sebesar Rp 21,42 juta. Besarnya angka positif ini tentu saja menambah keyakinan pada kita bahwa perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun akan semakin membaik sehingga kemampuan daya beli masyarakat juga semakin meningkat serta barang dan jasa juga mudah didapat di pasaran yang selanjutnya lapangan kerja juga semakin terbuka.

### 3. Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung

Sistem Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung adalah *Self Assisment System*. Peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung adalah Perda Nomor 16 Tahun 2010, jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 ini ada 11 jenis pajak daerah, berikut adalah jenis pajak daerah beserta tarifnya :

- a. Pajak Hotel, tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10 %
- b. Pajak Restoran, tarif yang ditetapkan paling tinggi 10 %
- c. Pajak Hiburan, tarif yang ditetapkan paling tinggi 35 %
- d. Pajak Reklame, tarif yang ditetapkan paling tinggi 25 %
- e. Penerangan Jalan, tarif yang ditetapkan paling tinggi 10 %
- f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan, tarif yang ditetapkan paling tinggi 25 %
- g. Pajak Parkir, tarif yang ditetapkan paling tinggi 30 %
- h. Pajak Air Tanah, tarif yang ditetapkan paling tinggi 20 %
- i. Pajak Sarang Burung Walet, belum dipungut

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, belum dipungut
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tarif yang ditetapkan paling tinggi 5 %

Implikasi dari pemberlakuan perda pajak ini adalah semua masyarakat Kabupaten Tulungagung dianggap tahu sehingga suka tidak suka semua orang harus patuh terhadap perda ini. Perda Nomor 16 Tahun 2010 ini telah diundangkan pada tanggal 2 Desember 2010, dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011, kecuali ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 atau sejak ditetapkannya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Penerimaan pajak yang selama ini dipungut oleh Pusat, yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB memang telah diserahkan kepada daerah tetapi tidak akan banyak berdampak terhadap tambahan beban masyarakat Kabupaten Tulungagung. Sedangkan Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak baru yang tidak dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung karena dianggap memiliki potensi pajak yang sangat kecil dan belum memadai.

## **B. Analisis Diskriptif**

Pada analisis deskriptif ini akan membahas perkembangan variabel-variabel yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung antara lain : Laju Inflasi, Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### 1. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah adalah jumlah keseluruhan penerimaan yang diterima oleh suatu daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, yang diukur dalam satuan rupiah. Data perkembangan dan pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung selama periode penelitian 2008 – 2012 telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, pada penelitian ini data yang disajikan adalah data per triwulan.

Tabel 4.1 Perkembangan penerimaan Pajak Daerah Tahun 2008 – 2012

Tahun	Penerimaan per Triwulan	Total penerimaan per Tahun
2008	1. Rp. 2.411.918.859,00	Rp. 11.499.718.475,60
	2. Rp. 2.720.592.699,20	
	3. Rp. 3.029.266.539,10	
	4. Rp. 3.337.940.379,30	
2009	1. Rp. 3.108.571.769,05	Rp. 12.995.028.234,20
	2. Rp. 3.202.028.629,00	
	3. Rp. 3.295.485.489,05	
	4. Rp. 3.338.942.348,10	
2010	1. Rp. 3.778.457.126,10	Rp. 16.449.108.667,40
	2. Rp. 4.004.337.153,10	
	3. Rp. 4.220.217.180,20	
	4. Rp. 4.436.097.207,00	
2011	1. Rp. 4.993.177.261,24	Rp. 22.086.869.272,74
	2. Rp. 5.345.537.299,30	
	3. Rp. 5.697.897.337,15	
	4. Rp. 6.050.257.375,05	
2012	1. Rp. 6.061.849.725,20	Rp. 25.543.716.677,80
	2. Rp. 6.277.902.688,30	
	3. Rp. 6.493.955.651,10	
	4. Rp. 6.710.008.614,20	

Sumber : DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012 cenderung mengalami peningkatan secara terus-menerus. Hal ini terlihat dari besarnya total Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2008 sebesar Rp. 11.499.718.475,60 tahun 2009 sebesar Rp. 12.995.028.234,20 tahun 2010 sebesar Rp. 16.449.108.667,40 tahun 2011 sebesar Rp. 22.086.869.272,74 hingga menjadi Rp. 25.543.716.677,80 pada tahun 2012. Selama periode penelitian, total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung tertinggi terjadi pada periode tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 25.543.716.677,80 dan terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 11.499.718.475,60. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat berarti. Berikut adalah data rincian jumlah penerimaan dari berbagai macam jenis pajak daerah yang dipungut :

Tabel 4.2 Jumlah penerimaan jenis Pajak Daerah 2008-2010

Jenis Pajak	Th. 2008	Th. 2009	Th. 2010
Pajak Hotel	Rp. 504.309.589,60	Rp. 570.208.068,40	Rp. 823.362.899,90
Pajak Restoran	Rp. 273.006.623,60	Rp. 455.920.854,20	Rp. 1.920.113.604,30
Pajak Hiburan	Rp. 63.034.772,40	Rp. 122.777.482,60	Rp. 239.654.148,70
Pajak Reklame	Rp. 433.035.681,00	Rp. 546.007.655,00	Rp. 804.368.584,50
Pajak Penerangan Jalan	Rp. 10.128.659.302,00	Rp. 11.220.132.710,00	Rp. 12.509.121.517,00
Pajak Mineral bukan logam dan batuan	Rp. 87.456.507,00	Rp. 70.514.964,00	Rp. 123.910.913,00
Pajak Parkir	Rp. 10.216.000,00	Rp. 9.369.500,00	Rp. 28.577.000,00
Pajak Air Tanah	-	-	-
BPHITB	-	-	-

Sumber : DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)

Tabel 4.3 Jumlah penerimaan jenis Pajak Daerah 2011-2012

Jenis Pajak	Th. 2011	Th. 2012
Pajak Hotel	Rp. 970.023.399,90	Rp. 1.082.704.274,00
Pajak Restoran	Rp. 2.236.067.152,16	Rp. 2.910.833.732,65
Pajak Hiburan	Rp. 335.544.285,00	Rp. 449.004.759,00
Pajak Reklame	Rp. 873.024.605,33	Rp. 821.232.214,15
Pajak Penerangan Jalan	Rp. 13.446.913.979,00	Rp. 14.439.611.068,00
Pajak Mineral bukan logam dan batuan	Rp. 147.892.511,00	Rp. 238.335.937,00
Pajak Parkir	Rp. 46.675.749,85	Rp. 47.696.700,00
Pajak Air Tanah	Rp. 158.275.124,00	Rp. 163.937.166,00
BPHTB	Rp. 3.872.452.466,50	Rp. 5.390.360.827,00

Sumber : *DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)*

## 2. Laju Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan dalam jangka waktu yang lama ( terus-menerus ) yang diukur dalam satuan persen (%). Laju inflasi dihitung dengan cara menghitung persentase kenaikan atau penurunan indeks harga ini dari tahun ke tahun yaitu tahun 2008 – 2012. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data laju Inflasi per triwulan dengan Indeks Harga Konsumen/IHK menggunakan tahun dasar 2002. Data per triwulan yang disajikan pada penelitian ini, besarnya sama dengan data laju inflasi per tahun, yang disebabkan karena adanya keterbatasan data kemudian diasumsikan bahwa besarnya laju inflasi pada satu tahun adalah sama nilainya dengan nilai per triwulan, dan nilai satu tahun itu bukan merupakan penjumlahan tiap



triwulan. Berikut adalah data perkembangan laju inflasi Kabupaten Tulungagung tahun 2008 – 2012 :

Tabel 4.4 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung tahun 2008 - 2012 ( % )

Tahun	Laju Inflasi per Triwulan
2008	1. 9,25 %
	2. 9,25 %
	3. 9,25 %
	4. 9,25 %
2009	1. 4,64 %
	2. 4,64 %
	3. 4,64 %
	4. 4,64 %
2010	1. 6,25 %
	2. 6,25 %
	3. 6,25 %
	4. 6,25 %
2011	1. 3,60 %
	2. 3,60 %
	3. 3,60 %
	4. 3,60 %
2012	1. 4,63 %
	2. 4,63 %
	3. 4,63 %
	4. 4,63 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung (Data diolah)

Pada tabel diatas menunjukkan laju inflasi kabupaten Tulungagung mengalami naik turun, laju inflasi tertinggi di Kabupaten Tulungagung terjadi pada tahun 2008 dengan tingkat inflasi sebesar 9,65 % hal ini terjadi saat di negara Indonesia mengalami krisis ekonomi. Namun pada tahun 2009 perekonomian Kabupaten Tulungagung sudah dalam keadaan yang membaik dan stabil, hal ini karena pada tahun tersebut tingkat inflasi di Kabupaten Tulungagung menjadi sebesar 4,64 % atau terjadi penurunan sebesar 5,01 % dari tahun sebelumnya, pada tahun 2010 mengalami peningkatan lagi yaitu sebesar 6,25 %, tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar

3,60 %, dan pada 2012 meningkat lagi menjadi sebesar 4,63 %. Tingkat laju inflasi Kabupaten Tulungagung dari tahun 2008 – 2012 selalu mengalami naik turun, secara keseluruhan tingkat laju inflasi Kabupaten Tulungagung dari tahun 2008 – 2012 masih dianggap sebagai inflasi ringan karena besarnya tingkat laju inflasi masih dibawah 10 %

### 3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar di suatu wilayah merupakan unsur penting bagi pembangunan. Penduduk yang besar jika dibina dan dikembangkan dengan baik dan terpadu akan menjadi Sumber Daya Manusia yang tangguh dalam mendukung pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung dari tahun ketahun terus bertambah. Penduduk merupakan Sumber Daya Manusia yang secara potensial dan dinamis mampu mengelola Sumber Daya Alam dan sumber daya buatan yang ada untuk mncapai tingkat produktivitas yang optimal sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Meningkatnya jumlah penduduk disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan penduduk .

Data per triwulan jumlah penduduk yang disajikan pada penelitian ini, besarnya sama dengan data jumlah penduduk per tahun, yang disebabkan karena adanya keterbatasan data kemudian diasumsikan bahwa besarnya jumlah penduduk pada satu tahun adalah sama nilainya dengan nilai per triwulan, dan nilai satu tahun itu bukan merupakan penjumlahan tiap triwulan. Data perkembangan penduduk Kabupaten Tulungagung per triwulan disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2008-2012 ( Jiwa )

Tahun	Jumlah Penduduk per Triwulan ( Jiwa )
2008	1. 1.025.034
	2. 1.025.034
	3. 1.025.034
	4. 1.025.034
2009	1. 1.030.926
	2. 1.030.926
	3. 1.030.926
	4. 1.030.926
2010	1. 1.037.369
	2. 1.037.369
	3. 1.037.369
	4. 1.037.369
2011	1. 1.043.386
	2. 1.043.386
	3. 1.043.386
	4. 1.043.386
2012	1. 1.048.472
	2. 1.048.472
	3. 1.048.472
	4. 1.048.472

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung (Data diolah)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008 sebanyak 1.025.034 jiwa, tahun 2009 sebesar 1.030.926, tahun 2010 sebesar 1.037.369, tahun 2011 sebesar 1.043.386, dan tahun 2012 sebanyak 1.048.472 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulungagung selalu meningkat, dan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 6.443 jiwa sedangkan paling rendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4.817 jiwa. Hal ini disebabkan karena sebagian penduduk bermigrasi dan pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan.

#### 4. PDRB

Data perkembangan PDRB berdasarkan harga konstan per triwulan disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2000 Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012

Tahun	PDRB per Triwulan	Total PDRB per tahun	Pertumbuhan PDRB per tahun (%)
2008	1.Rp. 1.679.228,91	Rp. 6.924.827,39	5,67 %
	2.Rp. 1.713.880,87		
	3.Rp. 1.748.532,83		
	4.Rp. 1.783.184,79		
2009	1.Rp. 1.798.187,39	Rp. 7.353.502,89	6,19 %
	2.Rp. 1.824.979,61		
	3.Rp. 1.851.771,83		
	4.Rp. 1.878.564,05		
2010	1.Rp. 1.912.811,14	Rp. 7.829.889,53	6,48 %
	2.Rp. 1.942.585,30		
	3.Rp. 1.972.359,47		
	4.Rp. 2.002.133,63		
2011	1.Rp. 2.039.851,31	Rp. 8.357.114,69	6,73 %
	2.Rp. 2.072.802,89		
	3.Rp. 2.105.754,46		
	4.Rp. 2.138.706,03		
2012	1.Rp. 2.180.543,48	Rp. 8.941.209,47	6,99 %
	2.Rp. 2.217.049,41		
	3.Rp. 2.253.555,33		
	4.Rp. 2.290.061,25		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung (Data diolah)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2008-2012 PDRB di Kabupaten Tulungagung meningkat setiap tahunnya, tahun 2008 total PDRB tercatat sebesar Rp 6.924.827,39 dan pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp 8.941.209,47. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,99%, sedangkan laju pertumbuhan PDRB paling rendah terjadi pada tahun 2008 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,67% hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya pasca krisis ekonomi global yang mulai terjadi tahun 2008 berdampak terhadap menurunnya kapasitas produksi perusahaan sehingga mengakibatkan perekonomian nasional menjadi lesu termasuk di wilayah Kabupaten Tulungagung.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Ratio

Dalam bagian ini, pembahasan lebih difokuskan pada pengukuran tingkat efektivitas dari pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung. Perhitungan tingkat efektivitas ini digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerah. Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, disamping itu analisis efektivitas dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam menentukan besarnya target penerimaan Pajak Daerah yang harus dicapai pada periode yang akan datang. Penargetan realisasi Pajak Daerah dimaksudkan untuk mendorong kinerja pemungutan Pajak Daerah, dalam upaya pemerintah daerah mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2008-2012 dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 4.7 Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Darerah Kabupaten Tulungagung tahun 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	Rp. 11.225.000.000,00	Rp. 11.499.718.475,60	102,44 %	SE
2009	Rp. 11.569.000.000,00	Rp. 12.995.028.234,20	112,33 %	SE
2010	Rp. 14.791.500.000,00	Rp. 16.449.108.667,40	111,21 %	SE
2011	Rp. 19.425.510.499,00	Rp. 22.086.869.272,74	113,70 %	SE
2012	Rp. 22.310.000.000,00	Rp. 25.543.716.667,80	114,49 %	SE

Sumber : *DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)*

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi, bahwa tingkat efektivitas dari pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran

2008-2012 ( lima tahun ), menunjukkan hasil yang sangat efektif. Selanjutnya diketahui pula, tingkat efektivitas rata-rata pertahun lebih dari 100 %. Hal ini menggambarkan bahwa secara rata-rata, tingkat efektivitas pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung adalah sangat baik, yaitu merupakan tingkat keberhasilan pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pemungutan pajak. Berdasarkan Perda No.16 Tahun 2010, jenis-jenis pajak daerah yang ada di kabupaten Tulungagung adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan dan pajak Parkir. Pada tahun 2011 dan 2012 Kabupaten Tulungagung mengalami penambahan dua jenis pajak daerah yang dipungut yaitu, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan. Berikut ini adalah perhitungan tingkat efektivitas masing-masing Pajak Daerah yang dipungut pemerintah Kabupaten Tulungagung :

a. Pajak Hotel

Tabel 4.7.1 Tingkat efektivitas Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	Rp.425.000.000,00	Rp.504.309.589,60	118,66 %	SE
2009	Rp.475.000.000,00	Rp. 570.208.068,40	120,04 %	SE
2010	Rp.675.000.000,00	Rp. 823.362.899,90	121,98 %	SE
2011	Rp.800.000.000,00	Rp.970.023.399,90	121,25 %	SE
2012	Rp.950.000.000,00	Rp.1.082.704.274,00	113,97 %	SE

Sumber : *DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)*

Pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung sangat efektif. Hal tersebut dapat di lihat dari tabel di atas. Pada tahun 2008-2012 tingkat efektivitas mengalami kenaikan yang signifikan, rata-rata sebesar 119 %.

## b. Pajak Restoran

Tabel 4.7.2 Tingkat efektivitas Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	Rp. 225.000.000,00	Rp. 273.006.623,60	121,34 %	SE
2009	Rp. 304.000.000,00	Rp. 455.920.854,20	149,97 %	SE
2010	Rp. 1.275.000.000,00	Rp. 1.920.113.604,30	150,60 %	SE
2011	Rp. 1.800.000.000,00	Rp. 2.236.067.152,16	124,23 %	SE
2012	Rp. 2.150.000.000,00	Rp. 2.910.833.732,65	135,39 %	SE

Sumber : *DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)*

Pemungutan pajak restoran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas. Pada tahun 2010, merupakan tingkat efektivitas yang paling tinggi yaitu sebesar 150,60, jika dilihat dari angka rata-rata tingkat efektivitasnya yaitu sebesar 135 % pemungutan Pajak Restoran sudah sangat efektif dan sangat baik.

## c. Pajak Hiburan

Tabel 4.7.3 Tingkat efektivitas Pajak Hiburan

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	Rp. 80.000.000,00	Rp. 63.034.772,40	78,79 %	CE
2009	Rp. 100.000.000,00	Rp. 122.777.482,60	122,78 %	SE
2010	Rp. 190.000.000,00	Rp. 239.654.148,70	126,13 %	SE
2011	Rp. 270.000.000,00	Rp. 335.544.285,00	124,28 %	SE
2012	Rp. 370.000.000,00	Rp. 449.004.759,00	121,35 %	SE

Sumber : *DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)*

Pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah efektif. Hal tersebut dapat di lihat dari tabel di atas. Pada tahun 2008 tingkat efektivitas hanya sebesar 78,79 %, namun pada tahun-tahun selanjutnya tingkat efektivitas Pajak Hiburan selalu diatas 100 %, dan rata-rata tingkat efektivitas mampu mencapai 119 %.

## d. Pajak Reklame

Tabel 4.7.4 Tingkat efektivitas Pajak Reklame

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	Rp. 360.000.000,00	Rp. 433.035.681,00	120,29 %	SE
2009	Rp. 500.000.000,00	Rp. 546.007.655,00	109,22 %	SE
2010	Rp. 700.000.000,00	Rp. 804.368.584,50	114,91 %	SE
2011	Rp. 800.000.000,00	Rp. 873.024.605,33	114,91 %	SE
2012	Rp. 800.000.000,00	Rp. 821.232.214,15	102,65 %	SE

Sumber : *DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat efektivitas Pajak Reklame mengalami perubahan dari tahun ke tahun sempat mengalami penurunan tingkat efektivitas yaitu pada tahun 2009 dimana pada tahun 2008 tingkat efektivitas sebesar 120,29 % dan menurun menjadi 109,22 % pada tahun 2009, akan tetapi dengan nilai rata-rata efektifitas sebesar 110 % maka dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Reklame sudah sangat efektif dan sangat baik.

## e. Pajak Penerangan Jalan

Tabel 4.7.5 Tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 10.128.659.302,00	101,29 %	SE
2009	Rp. 10.100.000.000,00	Rp. 11.220.132.710,00	111,09 %	SE
2010	Rp. 11.829.000.000,00	Rp. 12.509.121.517,00	105,75 %	SE
2011	Rp. 12.400.000.000,00	Rp. 13.446.913.979,00	108,44 %	SE
2012	Rp. 13.500.000.000,00	Rp. 14.439.611.068,00	106,96 %	SE

Sumber : *DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)*

Nilai perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan di wilayah Kabupaten Tulungagung berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 106 % adalah sangat efektif dan sangat baik, dalam lima tahun terakhir perkembangannya juga selalu mengalami fluktuasi.



## f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Tabel 4.7.6 Tingkat efektivitas Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	Rp. 125.000.000,00	Rp. 87.456.507,00	69,67%	CE
2009	Rp. 80.000.000,00	Rp. 70.514.964,00	88,14%	E
2010	Rp. 100.000.000,00	Rp. 123.910.913,00	105,75%	SE
2011	Rp. 100.000.000,00	Rp. 147.892.511,00	147,89%	SE
2012	Rp. 150.000.000,00	Rp. 238.335.937,00	158,59%	SE

Sumber : DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)

Pemungutan Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung sangat efektif dan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di atas yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2012, merupakan tingkat efektivitas yang paling tinggi yaitu sebesar 158,59 % . Nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 120 % adalah sangat efektif dan sangat baik.

## g. Pajak Parkir

Tabel 4.7.7 Tingkat efektivitas Pajak Parkir

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.216.000,00	102,16%	SE
2009	Rp. 10.000.000,00	Rp. 9.369.500,00	93,97%	E
2010	Rp. 22.500.000,00	Rp. 28.577.000,00	127,01%	SE
2011	Rp. 40.000.000,00	Rp. 46.675.749,85	116,69%	SE
2012	Rp. 40.000.000,00	Rp. 47.696.700,00	119,24%	SE

Sumber : DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)

Dalam kurun waktu terakhir, target dan realisasi pemungutan pajak parkir di wilayah Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan, dan hasil dari perhitungan tingkat efektivitas, diketahui bahwa setiap tahun tingkat efektivitas pemungutan Pajak Parkir mengalami kenaikan, hanya sekali mengalami penurunan yaitu pada tahun 2009. Nilai rata-rata 116 % menunjukkan angka yang sangat efektif dan sangat baik.

## h. Pajak Air Tanah

Tabel 4.7.8 Tingkat efektivitas Pajak Air Tanah

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2011	Rp. 120.000.000,00	Rp. 158.275.124,00	131,90%	SE
2012	Rp. 150.000.000,00	Rp. 163.937.166,00	109,29%	SE

Sumber : DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)

Diketahui bahwa meskipun baru 2 tahun tingkat efektivitas pemungutan Pajak Air Tanah tingkat efektifitasnya selalu diatas 100 %. Nilai rata-rata 119 % menunjukkan angka yang sangat efektif dan sangat baik.

## i. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTH)

Tabel 4.7.9 Tingkat efektivitas BPHTB

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2011	Rp. 3.095.510.499,00	Rp. 3.872.452.466,50	125,09%	SE
2012	Rp. 4.200.000.000,00	Rp. 5.390.360.827,00	128,34%	SE

Sumber : DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)

BPHTB masih baru 2 tahun menjadi jenis penerimaan dari sektor Pajak Daerah, tetapi potensinya dianggap sangat luar biasa. Pada tabel diatas bisa dilihat berapa besar target yang ditentukan dalam menggali potensi BPHTB tersebut. Nilai rata-rata efektivitas dari BPHTB adalah 126 %, dengan melihat perolehan nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas BPHTB sangat efektif dan sangat baik.

Berikut ini adalah urutan tingkat efektivitas pemungutan Pajak Daerah dari yang paling tinggi ke yang paling rendah tingkat efektivitasnya. Tingkat efektivitas didapatkan dengan cara menjumlahkan keseluruhan dari total realisasi dari setiap jenis pajak per total dari keseluruhan target dari setiap jenis pajak selama tahun 2008 – 2012 dikalikan dengan 100 %.

Tabel 4.8 Nilai Efektivitas Pemungutan jenis Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012

Jenis Pajak	Total target 2008-2012	Total realisasi 2008-2012	Eektivitas (%)	Keterangan
Pajak Restoran	Rp. 5.754.000.000,00	Rp. 7.795.941.966,00	135 %	SE
BPHTB	Rp. 7.295.510.499,00	Rp. 9.262.813.293,00	126 %	SE
Pajak Air Tanah	Rp. 270.000.000,00	Rp. 322.290.000,00	119 %	SE
Pajak Hotel	Rp. 3.325.000.000,00	Rp. 3.950.608.232,00	119 %	SE
Pajak Hiburan	Rp. 1.010.000.000,00	Rp. 1.210.015.448,00	119 %	SE
Pajak Mineral bukan logam dan batuan	Rp. 555.000.000,00	Rp. 668.110.832,00	120 %	SE
Pajak Reklame	Rp. 3.160.000.000,00	Rp. 3.477.668.740,00	110 %	SE
Pajak Parkir	Rp. 122.500.000,00	Rp. 142.534.949,90	116 %	SE
Pajak Penerangan Jalan	Rp. 57.829.000.000,00	Rp. 61.744.438.550,00	106 %	SE

Sumber : *DISPENDA Kabupaten Tulungagung (Data Diolah)*

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemungutan Pajak Daerah baik secara keseluruhan dan masing-masing jenis pajak daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 relatif sudah efektif. Secara keseluruhan di Kabupaten Tulungagung telah mampu mencapai target penerimaan Pajak Daerah. Kondisi ini terlihat dari tingkat efektivitas yang selalu mencapai diatas 100 %, dan kondis ini juga dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah setempat dalam menetapkan target dan sasaran Pajak Daerah pada periode selanjutnya, setidaknya dengan cara mempertahankan bahkan kalu bisa meningkatkan tingkat realisasinya.

## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pada uji asumsi klasik dan uji hipotesis data laju inflasi, jumlah penduduk dan PDRB di logaritma natural (Ln). Asumsi yang digunakan antara lain Normalitas, Multikolinieritas, Heterokedastisitas dan Autokorelasi.

a. Uji Asumsi Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model path mengikuti sebaran normal atau tidak. Model path yang baik adalah model dimana residualnya mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan dalam menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Residual model dikatakan mengikuti distribusi normal apabila nilai signifikansi uji lebih besar dari alpha yang digunakan. Hasil pengujian disajikan berikut ini.

Tabel 4.9 Perhitungan Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08025912
Most Extreme Differences	Absolute	.176
	Positive	.176
	Negative	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		.788
Asymp. Sig. (2-tailed)		.564

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Diolah, 2014

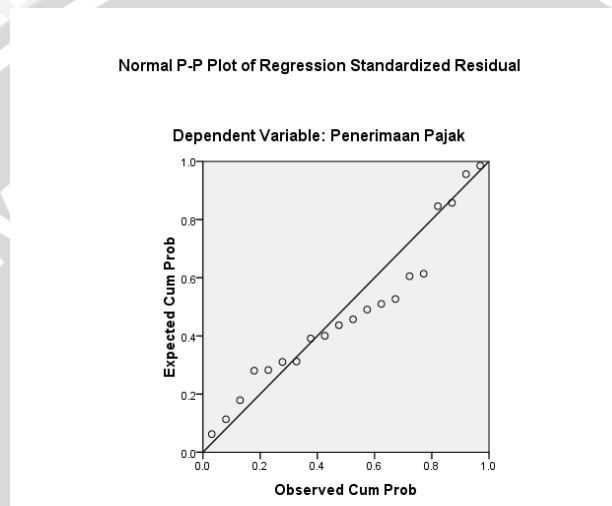
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Residual (Galat)	Signifikansi K-S	Keterangan
Model	0,564	Normal

Sumber : Data Diolah, 2014

Asumsi normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan pada tabel 4.9. Asumsi normalitas ini terpenuhi jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov residual model lebih besar dari alpha 5%. Dari hasil pengujian diatas diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,564. Karena nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari alpha 5%

(0,050) maka dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Selain menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, pengujian asumsi normalitas dapat pula dilakukan dengan menggunakan gambar histogram dan normal p-p plot.



Gambar 4.1 Histogram dan Normal P-P Plot Uji Normalitas

Dari gambar 4.1 memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

#### b. Uji Asumsi Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian dari asumsi yang terkait bahwa variabel bebas pada suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Kolinieritas ganda terjadi apabila terdapat hubungan yang sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel secara individu terhadap variabel terikat. Pengertian dari asumsi ini adalah bahwa setiap variabel bebas (prediktor) hanya berpengaruh pada variabel respon, dan bukan pada variabel bebas lainnya. Pengujian

multikolinieritas menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF).

Hipotesis pada asumsi ini yaitu :

$H_0$  : Terdapat multikolinieritas pada variabel bebas

$H_1$  : Tidak terdapat multikolinieritas pada variabel bebas

Pada regresi linier berganda, yang diharapkan adalah menolak hipotesis  $H_0$  yaitu tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas. Hipotesis  $H_0$  ditolak apabila nilai VIF lebih kecil dari 10, begitu pula sebaliknya, apabila nilai VIF lebih besar dari 10, maka hipotesis  $H_0$  diterima.

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel Bebas	Toleransi	VIF	Keterangan
Laju Inflasi ( $X_1$ )	.432	2.317	Bebas multikol
Jumlah Penduduk ( $X_2$ )	.107	9.344	Bebas Multikol
PDRB ( $X_3$ )	.101	9.934	Bebas Multikol

Sumber : Data Diolah, 2014

Tabel 4.11 merupakan hasil pengujian non multikolinieritas dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF pada *Laju Inflasi* ( $X_1$ ), *Jumlah Penduduk* ( $X_2$ ) dan *PDRB* ( $X_3$ ) lebih kecil dari 10, maka hipotesis  $H_0$  ditolak yaitu tidak terdapat hubungan linier variabel antar variabel bebas, sehingga secara umum asumsi ini terpenuhi.

#### c. Uji Asumsi Heterokedastisitas

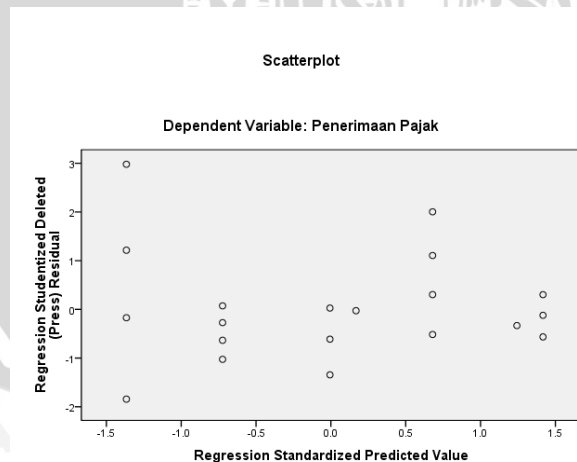
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah

model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Metode yang dapat dipakai untuk mendeteksi gejala heterokedasitas dalam penelitian ini adalah metode grafik.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat diketahui dengan dua hal, antara lain :

- 1) Jika pencarian data yang berupa titik-titik membentuk pola tertentu dan beraturan, maka terjadi masalah heteroskedastisitas.
- 2) Jika pencarian data yang berupa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Adapun grafik hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan SPSS versi 16.0 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar 4.2. Scatterplot Uji Heterokedastisitas

Hasil analisis pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heterokedastisitas pada kedua model yang diuji sehingga asumsi ini terpenuhi.

Selain menggunakan grafik, pengujian asumsi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Park yaitu dengan meregresikan nilai residual kuadrat dengan variabel bebas. Nilai signifikansi yang lebih besar dari alpha 0,05 menunjukkan bahwa asumsi heterokedastisitas terpenuhi.

Tabel 4.12 Perhitungan Pengujian Heterokedastisitas Uji Park  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4683.485	7555.920		-.620	.544
Laju Inflasi	-3.713	4.494	-.284	-.826	.421
Jumlah Penduduk	2139.548	3121.876	.488	.685	.503
PDRB	-353.985	278.890	-.927	-1.269	.222

Sumber : Data Diolah, 2014

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Heterokedastisitas Uji Park

Variabel Bebas	t hitung	Sig.	Keterangan
Laju Inflasi (X1)	826	.421	Bebas hetero
Jumlah Penduduk (X2)	685	.503	Bebas hetero
PDRB (X3)	1269	.222	Bebas hetero

Sumber : Data Diolah, 2014

Tabel 4.11 merupakan hasil pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan uji Park. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Laju Inflasi (X1) sebesar 0,421, Jumlah Penduduk (X2) sebesar 0,503, dan PDRB (X3) sebesar 0,222 dan lebih besar dari alpha 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi heterokedastisitas terpenuhi.

d. Asumsi Autokorelasi

Menurut Ghozali (2007:95) tujuan uji autokorelasi adalah: “Menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya)”.



Jika terjadi korelasi, dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). Panduan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai durbin watson test.

Jika nilai DW lebih kecil dari nilai dL atau lebih besar dari nilai 4-dL, maka model regresi yang digunakan terdapat kecenderungan autokorelasi. Jika nilai DW berada antara nilai dU dan nilai 4-dU, maka model regresi yang digunakan bebas autokorelasi. Jika nilai DW berada antara nilai dL dan nilai dU atau berada antara nilai 4-dU dan 4-dL, maka tidak dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan bebas autokorelasi atau tidak. Pada kasus seperti ini dapat dilihat kecenderungan nilai DW berada pada daerah C atau daerah abu-abu.

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Autokorelasi

A	dL	C	dU	B	4-dU	C	4-dL	A
	0,998		1,676		2,324		3,002	
Durbin Watson (DW) = 1,441								

Keterangan: A: Terdapat autokorelasi B: Bebas autokorelasi C: Daerah abu-abu

Hasil pengujian asumsi autokorelasi dengan metode Durbin Watson pada Tabel 4.14 didapatkan nilai DW sebesar 1,441 yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan berada pada daerah abu-abu karena berada antara nilai dL dan nilai dU.

### 3. Hasil Uji Hipotesis

#### a. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel dependen yaitu Penerimaan

Pajak (Y) dengan variabel independen yaitu Laju Inflasi (X1), Jumlah Penduduk (X2), PDRB (X3). Hasil uji Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS versi 16.0 ditunjukkan pada Tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel bebas	Koefisien Regresi	t hitung	Sig. t	Keterangan
(Constant)	-433.353	-4.702	.000	
Laju Inflasi (X1)	.058	.670	.512	Non Signifikan
Jumlah Penduduk (X2)	33.035	4.476	.000	Signifikan
PDRB (X3)	.541	.851	.407	Non Signifikan
t tabel = $t_{(33,5\%)}$	= 2,120			
R	= 0,968			
R-square	= 0,938			
Adj. R-square	= 0,926			
F hitung	= 80,089			
Sig. F	= 0,000			
F tabel $(4,33,5\%)$	= 3,239			

Sumber : Data Diolah, 2014

Variabel dependen pada hasil uji regresi berganda adalah Penerimaan Pajak (Y) sedangkan variabel independennya adalah Laju Inflasi (X1), Jumlah Penduduk (X2), dan PDRB (X3). Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :

$$Y = -433.353 + 0,058X1 + 33,035X2 + 0,541PDRB X3 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa :

- 1) Koefisien regresi Laju Inflasi (X1) sebesar 0,058 dengan nilai t hitung 0,670 (lebih kecil dari 2,120) atau nilai signifikan 0,512 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel Inflasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan Inflasi (X1)

sebesar 1 % maka Penerimaan Pajak (Y) belum tentu akan mengalami peningkatan sebesar 0,670 juta.

2) Koefisien regresi Jumlah Penduduk (X2) sebesar 33,035 dengan nilai t hitung 4,476 (lebih besar dari 2,120) atau nilai signifikan 0,00 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya bahwa variabel Jumlah Penduduk (X2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan Inflasi (X1) sebesar 1 juta orang maka Penerimaan Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 4,476 juta.

3) Koefisien regresi PDRB (X3) sebesar 0,541 dengan nilai t hitung 0,851 (lebih kecil dari 2,120) atau nilai signifikan 0,407 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel PDRB (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan PDRB (X3) sebesar 1 juta maka Penerimaan Pajak (Y) belum tentu mengalami peningkatan sebesar 0,851 juta.

#### b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Menurut Ghozali (2006), kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam

model. Setiap penambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan nilai *R Square* untuk mengevaluasi model regresi terbaik.

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui nilai *R Square* sebesar 93,8 atau 94,0%. Artinya variabel Penerimaan Pajak (Y) dijelaskan sebesar 93,8% oleh variabel Laju Inflasi (X1), Jumlah Penduduk (X2), PDRB (X3). Sedangkan sisanya sebesar 6,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi.

#### c. Uji Hipotesis Simultan

Untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik F. Dalam hipotesis I, diduga bahwa variabel Laju Inflasi (X1), Jumlah Penduduk (X2), PDRB (X3) secara bersama-sama mempengaruhi Penerimaan (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa F hitung sebesar 80,089 (Sig F = 0,000). Jadi, F hitung > F<sub>tabel</sub> (80,089 > 3,239) dan Sig F < 5% (0,000 < 0,05). Dengan demikian H<sub>1</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel Laju Inflasi (X1), Jumlah Penduduk (X2), PDRB (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y). Maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi pengaruh Laju Inflasi (X1), Jumlah Penduduk (X2), PDRB (X3) pada Penerimaan Pajak (Y).

#### d. Uji Hipotesis Parsial

Untuk menguji hipotesis II yaitu pengaruh parsial dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik t. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari tiga variabel independen terdapat satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yang dijelaskan sebagai berikut :

Table 4.16 Perhitungan Uji Hipotesis Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	-443.353	94.298				-4.702
Laju Inflasi	.058	.086	.064	.670	.512	.432	2.317
Jumlah Penduduk	33.035	7.380	.855	4.476	.000	.107	9.344
PDRB	.541	.636	.168	.851	.407	.101	9.934

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

1) Variabel Laju Inflasi (X1)

Table 4.17 Variabel Laju Inflasi

Variabel bebas	Koefisien Unstandardized	t hitung	Sig. t	Keterangan
Laju Inflasi (X1)	0.058	0.670	0.512	Non Signifikan

Untuk variabel laju Inflasi (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 0,670. Nilai ini lebih kecil dari t tabel (2,120) dan Sig t (0,512) lebih besar dari 5% (0,05). Sehingga pengujian hipotesis untuk Ho ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel laju Inflasi (X1) tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak (Y).

2) Variabel Jumlah Penduduk (X2)

Tabel 4.18 Variabel Jumlah Penduduk

Variabel bebas	Koefisien Unstandardized	t hitung	Sig. t	Keterangan
----------------	--------------------------	----------	--------	------------

Jumlah Penduduk (X2)	33.035	4.476	0.000	Signifikan
----------------------	--------	-------	-------	------------

Untuk variabel Jumlah Penduduk (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 4,476. Nilai ini lebih besar dari t tabel (2,120) dan Sig t (0,000) lebih kecil dari 5% (0,05). Sehingga pengujian hipotesis untuk  $H_0$  diterima. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel Jumlah Penduduk (X2) mempengaruhi Penerimaan Pajak (Y).

### 3) Variabel PDRB (X3)

Tabel 4.19 Variabel PDRB

Variabel bebas	Koefisien Unstandardized	t hitung	Sig. t	Keterangan
PDRB (X3)	0.541	0.851	0.407	Non Signifikan

Untuk variabel PDRB (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 0,541. Nilai ini lebih kecil dari t tabel (2,120) dan Sig t (0,407) lebih besar dari 5% (0,05). Sehingga pengujian hipotesis untuk  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel PDRB (X3) tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak (Y).

## D. Interpretasi Pembahasan

### 1. Pengaruh Laju Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel laju inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa laju inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Laju inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan. Peningkatan biaya produksi akan menyebabkan keuntungan yang

diperoleh perusahaan berkurang. Oleh karena berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut menjadi semakin menurun.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiana Advina Helti (2010) yang menyatakan bahwa variabel laju inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Dari penelitian ini nilai signifikan 0,512 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel laju inflasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak(Y). Ketidaksesuaian antara teori dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung, karena inflasi menyebabkan kenaikan harga barang secara terus menerus yang berdampak terhadap berkurangnya daya beli masyarakat. Masyarakat yang dirugikan dalam hal ini adalah buruh yang bergaji tetap, karena kenaikan harga barang tidak disertai dengan kenaikan pendapatan yang setara dengan kenaikan laju inflasi. Sedangkan bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dampak inflasi ini tidak begitu dirasakan karena berapapun tingginya harga suatu barang, maka barang tersebut tetap akan dibeli karena merupakan sifat konsumtif manusia. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan tetap stabil dan penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut juga relatif stabil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dampak kenaikan inflasi, maka tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Daerah karena masyarakat yang berpenghasilan tinggi masih dapat

menyerap hasil produksi yang dihasilkan perusahaan, sehingga pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut relatif stabil.

## 2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Hasil itu juga sesuai dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

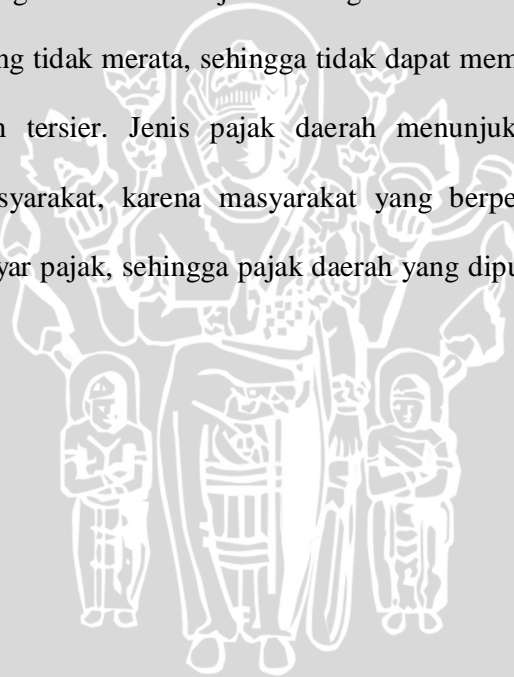
Dari penelitian ini nilai signifikan 33,035 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel Jumlah Penduduk ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak ( $Y$ ). Koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 4,476 menjelaskan bahwa apabila peningkatan jumlah penduduk ( $X_2$ ) sebesar 1 juta orang maka Penerimaan Pajak ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 4,476 juta. Kesesuaian antara teori dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung, karena dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan bertambahnya potensi jumlah penduduk untuk membayar pajak daerah (wajib pajak) dan tingginya lapangan pekerjaan yang menyebabkan meningkatnya partisipasi penduduk dalam membayar pajak daerah (penduduk punya pendapatan sehingga dapat membayar pajak).

## 3. Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah



Hasil penelitian ini menunjukkan variabel PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Dari hasil pengolahan data telah didapatkan besarnya nilai signifikan variabel PDRB sebesar 0.407 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel laju inflasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Nilai PDRB yang rendah menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat Kabupaten Tulungagung tidak merata, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Jenis pajak daerah menunjukkan pemenuhan kebutuhan tersier masyarakat, karena masyarakat yang berpenghasilan tinggi masih mampu membayar pajak, sehingga pajak daerah yang dipungut pemerintah tersebut relatif stabil.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data, dalam pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2008 - 2012, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Restoran sebesar 135 % yang berarti sangat efektif, BPHTB sebesar 126 % yang berarti sangat efektif, Pajak Air Tanah sebesar 119 % yang berarti sangat efektif, Pajak Hotel 119 % yang berarti sangat efektif, Pajak Hiburan sebesar 119 % yang berarti sangat efektif, Pajak Bahan Galian Golongan C sebesar 120 % yang berarti sangat efektif, Pajak Reklame sebesar 110 % yang berarti sangat efektif, Pajak Parkir sebesar 116 % yang berarti sangat efektif, dan Pajak Penerangan Jalan sebesar 106 % yang berarti sangat efektif, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008 – 2012 secara keseluruhan sangat efektif.
2. Uji secara individu (uji t) pada variabel independen yaitu Laju inflasi, jumlah penduduk dan PDRB dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X2) mempengaruhi variabel penerimaan pajak (Y) Kabupaten Tulungagung, sedangkan variabel Laju Inflasi (X1) dan PDRB (X3) tidak mempengaruhi variabel penerimaan pajak (Y) Kabupaten Tulungagung tahun 2008 - 2012.

3. Uji secara keseluruhan (uji F) menunjukkan semua variabel independen yaitu Laju inflasi, Jumlah Penduduk, dan PDRB secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2008 – 2012.
4. Dari hasil pengujian diperoleh nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 93,8. Berarti bahwa 93,8 % variasi variabel dependen Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Laju Inflasi, Jumlah Penduduk dan PDRB. Sedangkan sisanya yaitu 6,2 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model.
5. Hasil pengujian asumsi klasik menyimpulkan bahwa variabel independen (Laju Inflasi, Jumlah Penduduk, dan PDRB) pada uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi, sedangkan pada uji autokorelasi disimpulkan bahwa terdapat pada daerah abu-abu
6. Diantara variabel Laju inflasi, jumlah penduduk dan PDRB maka yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah adalah variabel Jumlah Penduduk. Variabel yang mempengaruhi besarnya penerimaan Pajak Daerah ini bisa digunakan untuk mengambil kebijakan Efektivitas pemungutan Pajak Daerah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan analisis data, dalam pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tulungagung dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Bersadarkan hasil penelitian, dari berbagai macam jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah kabupaten Tulungagung, nilai efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan adalah yang paling kecil yaitu sebesar 106 %, maka diharapkan pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar beban pajak yang ditanggungnya atas pajak penerangan jalan, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak penerangan jalan dan peraturan pajak yang mengikatnya. Dengan pahamiannya masyarakat tentang pajak penerangan jalan, maka akan membawa dampak positif dalam pembayaran pajak tersebut serta akan meningkatkan nilai efektivitas pemungutan pajaknya.
2. Jumlah Penduduk sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pajak Daerah, seharusnya dioptimalkan yaitu dengan cara meningkatkan jumlah lapangan kerja, dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan akan menyebabkan semakin besar pula potensi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung (penduduk punya pendapatan sehingga dapat membayar pajak).
3. Penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat membuat penelitian yang lebih baik dan lebih mendalam serta menggunakan olah data dengan metode analisa yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Buku Pedoman Skripsi. 2013. *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*. Malang.
- Damodar, Gujarati. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung. Available. <http://www.dispenda.pemkabta.com>. Selasa 10 Desember 2013 15.38
- Istriyah Nikmah Fajarwati, (2008) “*Analisis efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah (Studi kasus pemerintahan Kota Surakarta)*”. Skripsi. UNS Surakarta.
- Kristiana Advina Helti, (2010) “*Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pajak daerah serta tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan*”. Skripsi. UNS Surakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STI YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Nurrohman, Alfian. 2010. “*Analisis faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota Surakarta (Tahun 1994-2007)*”. Skripsi . UNS Surakarta.
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku latihan SPSS Parametrik*. Jakarta : PT Elex media Komputindo.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang, Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

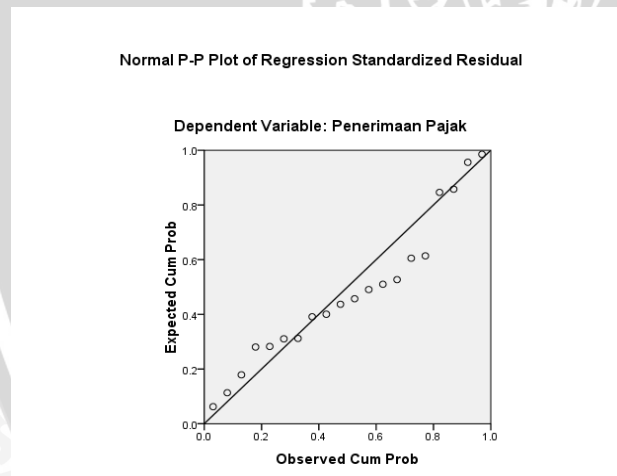


Lampiran 1. Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08025912
Most Extreme Differences	Absolute	.176
	Positive	.176
	Negative	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		.788
Asymp. Sig. (2-tailed)		.564

a. Test distribution is Normal.



Lampiran 2. Asumsi Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Inflasi	.432	2.317
Jumlah Penduduk	.107	9.344
PDRB	.101	9.934

Lampiran 3. Asumsi Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.968 <sup>a</sup>	.938	.926	.08746	1.441

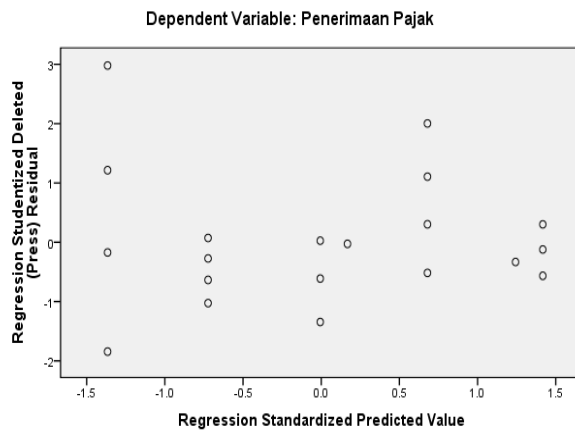
Lampiran 4. Asumsi Heterokedastisitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-4683.485	7555.920		-.620	.544		
Laju Inflasi	-3.713	4.494	-.284	-.826	.421	.457	2.190
Jumlah Penduduk	2139.548	3121.876	.488	.685	.503	.106	9.398
PDRB	-353.985	278.890	-.927	-1.269	.222	.101	9.880

a. Dependent Variable:  
RES2

Scatterplot





Lampiran 5. Regresi Linier Berganda

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.968 <sup>a</sup>	.938	.926	.08746	1.441

a. Predictors: (Constant), PDRB, Laju Inflasi, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.838	3	.613	80.089	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.122	16	.008		
	Total	1.960	19			

a. Predictors: (Constant), PDRB, Laju Inflasi, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-443.353	94.298		-4.702	.000		
	Laju Inflasi	.058	.086	.064	.670	.512	.432	2.317
	Jumlah Penduduk	33.035	7.380	.855	4.476	.000	.107	9.344
	PDRB	.541	.636	.168	.851	.407	.101	9.934

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Lampiran 6. Surat Ijin Riset



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**DINAS PENDAPATAN**  
Jl. Ahmad Yani Timur No 37 Telepon / Fax. (0355) 320098  
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 20 Maret 2014

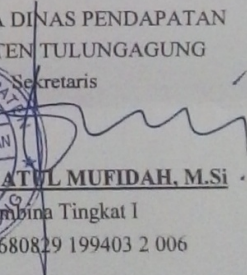
Nomor : 072/ 460 /105/2014  
S i f a t : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian ijin Riset/Survey

Kepada,  
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya Malang  
di -  
MALANG

Menindaklanjuti Surat Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 072/609/407.204/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Perihal Ijin Riset / Survey, dapat disampaikan bahwa Nama : Sdr. ANDYS DWI SAPUTRA Diperkenankan untuk Mengadakan Riset atau Survey di Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 10 Maret s/d 10 Juni 2014.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Sekretaris

  
**Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680829 199403 2 006



Lampiran 7. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

Nama : Andys Dwi Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 105030400111019  
Tempat dan tanggal lahir : Tulungagung, 23 Oktober 1991  
Pendidikan : 1. SD Negeri Tawing 02 ,Tamat tahun 2004  
2. SMP Negeri 01 Tulungagung,Tamat tahun 2007  
3. SMA Negeri 01 Boyolangu ,Tamat tahun 2010  
Pekerjaan :-  
Publikasi – publikasi  
atau karya ilmiah :-

